

EDISI 76/JANUARI-JUNI/2019



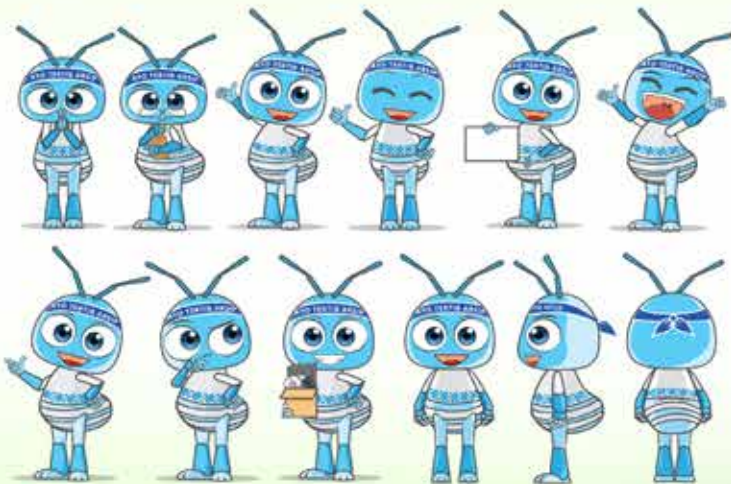
ARSIP

Media Kearsipan Nasional

KEARSIPAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0



Hai Sahabat Arsip...
Aku maskot "Tertib Arsip"
Aku yang akan mengingatkan
sahabat arsip untuk mengelola
dan menjaga arsip dengan
baik....



DAFTAR ISI



5 KEARSIPAN INDONESIA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Arsiparis memiliki tantangan dalam penyelenggaraan arsip di era revolusi industri 4.0, diantaranya arsip yang tercipta akan mengarah pada arsip berbasis teknologi digital dan *cloud computing*. Era Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan melimpahnya data dan informasi, *cyber physical system*, hingga pengelolaan big data.

DARI REDAKSI ————— **4**

KHAZANAH ————— **19**

PEMILU 1955 DAN PARA PENYELENGGARANYA

PRESERVASI ————— **23**

DIGITALISASI ARSIP PAMFLET DAN POSTER KEMENTERIAN PENERANGAN 1942-1949 DI ANRI

PROFIL ————— **26**

J.B. SUMARLIN: EKONOM SEDERHANA YANG SELALU TAMPIL MEMBUAT GEBAKAN

MANCANEGARA ————— **28**

CODING DA VINCI : KOLABORASI KERJA KREATIF ARSIPARIS DI JERMAN



11 MENAKAR MASA DEPAN KEARSIPAN INDONESIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Di era revolusi industri 4.0, hampir tidak ada arsiparis yang bekerja tidak dengan menatap layar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hampir semua pekerjaan arsiparis kini dilakukan dengan bantuan kemajuan TIK. Perubahan cara kerja arsiparis, mau tidak mau, menggeser bidang-bidang kearsipan yang semula dikerjakan secara manual menjadi dengan bantuan TIK.

DAERAH ————— **31**

ARSIP EMAS: TEROBOSAN ARPUSDA JATENG DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

TEKNOLOGI ————— **33**

INDUSTRI 4.0: PENGGUNAAN DATA BESAR DALAM BIDANG KEARSIPAN

HUKUM ————— **37**

MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI ARSIP YANG AUTENTIK DALAM PENYELENGGARAAN SPBE

CERITA KITA ————— **40**

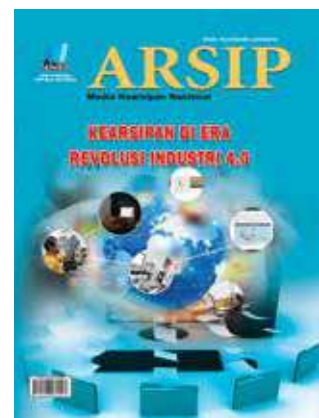
ARSIP UNTUK KEDAULATAN BANGSA

LIPUTAN ————— **43**



15 PERAN SERTA PT. TELKOM TERHADAP PERKEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Sejarah telekomunikasi di Indonesia tidak terlepas dari peran PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom). PT. Telkom adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Berdasarkan sejarahnya, PT. Telkom telah mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi. Bermula dengan terbentuknya Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi) yang merupakan pemecahan dari Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) pada 1965.



Cover Designer : Isanto

KETERANGAN COVER

Visualisasi mengenai konektivitas arsip, data, dan informasi dalam lingkaran dunia teknologi informasi

Pembina:

Kepala ANRI,
Sekretaris Utama,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi dan
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab:

M. Imam Mulyantono

Pemimpin Redaksi:

Gurandhyka

Wakil Pemimpin Redaksi:

Rosnarjo

Dewan Redaksi:

Azmi, Hilman Rosmana,
M. Ihwan,
Bambang Parjono Widodo,

Redaktur Pelaksana:

Bambang Barlian,
Susanti,
Mudanto Pamungkas

Editor:

Dhani Sugiharto,
Aria Maulana,
Rayi Darmagara,
R. Suryagung Sudibyo P,
Intan Lidwina,
Annawaty Betawinda,
Erieka Nurlidya,
Khoerun Nisa Fadillah,

Fotografer:

Muhamad Dullah
Lukman Nul Hakim

Desain Grafis:

Beny Oktavianto
Isanto

Sekretariat:

Yuanita Utami,
Krestiana Evelyn

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Bagian Humas dan TU Pimpinan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: humas@anri.go.id



Rapat Tim Redaksi

Industri 4.0 merupakan label yang diberikan untuk tren otomatisasi dan pertukaran data saat ini. Industri 4.0 biasanya disebut sebagai revolusi industri keempat yang ditandai dengan *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IOT)*, *Unmanned Vehicles (UAV)*, *Mobile Technology (5G)*, *Shared Platform*, *Block Chain*, *Robotics* dan *Bio-Technology*. Industri 4.0 akan menghasilkan banyak kreativitas dan inovasi.

Implementasi Industri 4.0 tidak hanya memiliki potensi luar biasa dalam merombak aspek industri, bahkan juga mampu mengubah berbagai aspek dan bidang, termasuk aspek penyelenggaraan kearsipan. Seiring perkembangan teknologi yang ada, arsip yang tercipta di era revolusi industri 4.0 sudah tidak lagi menggunakan media konvensional melainkan sudah berbasis elektronik. Hal inilah yang menjadi tantangan dunia kearsipan dalam melakukan pengelolaan arsip berbasis elektronik.

Pada tema kali ini majalah ARSIP mengangkat tema Penyelenggaraan Kearsipan di Era Revolusi Industri 4.0 yang membahas mengenai perkembangan penyelenggaraan kearsipan di era revolusi industri 4.0. Kami sajikan pula Rubrik Khazanah, Rubrik Daerah, Rubrik Mancanegara, Rubrik Hukum, Rubrik Varia, Rubrik Cerita Kita dan Rubrik Liputan mengenai berita-berita kearsipan menjadi pelengkap pada edisi kali ini.

Akhirnya, semoga sajian informasi edisi kali ini, dapat memberikan manfaat bagi Sahabat Arsip. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh saran dan kritik untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Salam Redaksi

KEARSIPAN INDONESIA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Revolusi industri pertama atau dikenal 1.0 dimulai pada sekitar abad ke-18 yang ditandai dengan penemuan mesin uap guna meningkatkan produktivitas yang bernilai tinggi. Sebagai contoh di Inggris, saat itu, perusahaan tenun menggunakan mesin uap untuk menghasilkan produk tekstil. Kemudian Revolusi industri 2.0 dimulai pada tahun 1900-an, hal ini ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Beberapa industri di Indonesia mengalami pertumbuhan, seperti sektor agro dan pertambangan. Revolusi yang kedua ini terkait dengan teknologi di lini produksi. Kemudian, di era revolusi industri 3.0, saat otomatisasi dilakukan pada tahun 1970 atau 1990-an hingga saat ini karena sebagian negara masih menerapkan industri ini. Pada revolusi industri

keempat atau 4.0, efisiensi mesin dan manusia sudah mulai terkoneksi dengan *internet of things*.

Industri 4.0 merupakan nama yang diberikan untuk tren otomatisasi dan pertukaran data saat ini. Hal ini termasuk sistem *cyber-fisik*, Internet, komputasi awan dan komputasi kognitif. Industri 4.0 biasanya disebut sebagai revolusi industri keempat yang ditandai dengan *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IOT)*, *Unmanned Vehicles (UAV)*, *Mobile Technology (5G)*, *Shared Platform*, *Block Chain*, *Robotics* dan *Bio-Technology*. Industri 4.0 akan menghasilkan banyak kreativitas dan inovasi.

Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah merancang *Making Indonesia 4.0* sebagai sebuah roadmap

(peta jalan) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industri 4.0. Guna mencapai sasaran tersebut, langkah kolaboratif ini perlu melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan, asosiasi dan pelaku industri, hingga unsur akademisi.

Dikutip melalui siaran pers dalam website <http://www.kemenperin.go.id>, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto juga menyampaikan, semua negara masih mempelajari implementasi sistem Industri 4.0, sehingga dengan penyiapan peta jalannya, Indonesia berpeluang menjadi pemain kunci di Asia. "Kita melihat banyak negara, baik yang maju maupun berkembang, telah menyerap pergerakan ini ke agenda nasional mereka dalam rangka

LAPORAN UTAMA

merevolusi strategi industrinya agar semakin berdaya saing global. Dan, Indonesia siap untuk mengimplementasikan,” tegasnya.

Implementasi Industri 4.0 tidak hanya memiliki potensi luar biasa dalam merombak aspek industri, bahkan juga mampu mengubah berbagai aspek dalam kehidupan manusia. “Kita punya pasar dalam negeri yang kuat, dan punya banyak talenta dari jumlah universitas yang ada, sehingga tersedianya pool of talent,” kata Menperin.

Jadi, langkah dasar yang sudah diawali oleh Indonesia, yakni meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program link and match antara pendidikan dengan industri. Upaya ini dilaksanakan secara sinergi antara Kemenperin dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Bappenas, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan menerapkan Industri 4.0, Airlangga menargetkan, aspirasi besar nasional dapat tercapai. Aspirasi tersebut secara garis besar, yaitu membawa Indonesia menjadi 10 besar ekonomi di tahun 2030, mengembalikan angka *net export* industri 10 persen, peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga dua kali lipat dibanding peningkatan biaya tenaga kerja, serta pengalokasian 2 persen dari GDP untuk aktivitas R&D teknologi dan inovasi atau tujuh kali lipat dari saat ini.

“Sejak tahun 2011, kita telah memasuki Industri 4.0, yang ditandai meningkatnya konektivitas, interaksi,



Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto

dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Sosialisasi Roadmap Implementasi Industry 4.0 di Jakarta, Selasa (20/3).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, revolusi industri generasi pertama ditandai oleh penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Kemudian, generasi kedua, melalui penerapan konsep produksi massal dan mulai dimanfaatkannya tenaga listrik. Dan, generasi ketiga, ditandai dengan penggunaan teknologi otomasi dalam kegiatan industri.

“Pada revolusi industri keempat, menjadi lompatan besar bagi sektor industri, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas

produk yang lebih baik,” paparnya. Untuk itu, sektor industri nasional perlu banyak pembenahan terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing di era Industry 4.0. Adapun lima teknologi utama yang menopang pembangunan sistem Industri 4.0, yaitu *Internet of Things*, *Artificial Intelligence*, *Human-Machine Interface*, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi *3D Printing*.

Lalu bagaimana dampaknya revolusi industri 4.0 terhadap penyelenggaraan kearsipan. Seiring perkembangan teknologi yang ada, arsip-arsip yang tercipta di era revolusi industri 4.0 sudah tidak lagi menggunakan media konvensional melainkan sudah berbasis elektronik. Hal inilah yang menjadi tantangan dunia kearsipan dalam melakukan pengelolaan arsip berbasis elektronik. Arsiparis memiliki tantangan dalam pengelolaan arsip di era revolusi industri 4.0, diantaranya arsip-arsip yang tercipta akan mengarah pada arsip berbasis teknologi digital dan cloud computing. Pada Era Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan melimpahnya data dan informasi, *cyber physical system*, hingga pengelolaan big data. Bagi para pekerja informasi seperti arsiparis inilah yang harus diantisipasi sejak awal karena Arsiparis dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memahami teknologi informasi.

Menghadapi era revolusi industri 4.0, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dituntut mampu mentransformasikan sistem kearsipan yang masih manual ke sistem digital. Untuk dapat mewujudkan transformasi tersebut dibutuhkan beberapa

strategi diantaranya mengefektifkan program pembinaan kearsipan. Ini perlu dilakukan untuk membangun komitmen pimpinan nasional dan daerah untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan *environment*, *culture* and *digital skills* di lembaga kearsipan maupun pencipta arsip. “Yang kedua mengembangkan sistem digital dengan cara selalu mencoba dan penerapan prototype teknologi terbaru, *Learning by doing!*, dengan menyempurnakan dan mengimplementasikan e-arsip baik sebagai aplikasi bagi dipakai (generic) dalam e-office maupun aplikasi layanan kearsipan (spesifik) dalam rangka implementasi *electronic government* untuk mempercepat reformasi birokrasi,” ujar Kepala ANRI, Mustari Irawan periode 2014-2019.

Berikutnya yang harus dilakukan adalah mengembangkan sistem akses triple A yakni *anytime*, *anywhere*, *anyhow*, melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang dioptimalkan sebagai infrastruktur akses arsip secara nasional. Ini juga sebagai bagian dari upaya terbentuknya *digital history*, *digital memory* dan *digital identity*. ANRI dituntut mampu menyusun kurikulum dan menyelenggarakan pendidikan kearsipan yang telah memasukan materi *human-digital skills*, untuk mempersiapkan SDM kearsipan yang mampu mengelola arsip yang tercipta di era 4.0. Dan tahap terakhirnya adalah sosialisasi kearsipan untuk meningkatkan literasi kearsipan secara masif.

Dalam menyongsong Revolusi Industri 4.0, Mustari mengaku bahwa



Kepala ANRI, Mustari Irawan
(Periode 2014-2019)

banyak tantangan yang sangat berat bagi Arsiparis, antara lain adalah ekosistem kearsipan yang masih buruk. Misalnya dukungan pimpinan nasional, daerah, instansi, yang pada umumnya masih rendah mengakibatkan pengelolaan arsip masih belum tertib. Kemudian masalah budaya atau kultur yang masih belum seperti negara maju. “Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi oleh sebagian besar arsiparis juga masih memprihatinkan, sehingga berdampak pada pengelolaan arsip elektronik. Pengelolaan dokumen dan arsip secara elektronik sudah banyak dilakukan di instansi pemerintah, maupun swasta saat ini, sehingga arsiparis harus melihat ini sebagai bagian dari program manajemen kearsipan” terang Mustari. Transformasi kearah sistem digital (elektronik) dilakukan oleh ANRI melalui persiapan lingkungan strategis (ekosistem) untuk pengelolaan arsip menuju budaya digital, penerapan sistem informasi kearsipan digital, dan peningkatan akses digital ke informasi arsip seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dengan

menggunakan SIKN, SIKS, dan SIKN-JIKN. Termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas infrastruktur TIK baik data center/e-depot, jaringan dan bandwidth.

Salah satu inovasi teknologi informasi yang telah digunakan oleh ANRI adalah dengan cloud computing. Cloud computing telah digunakan oleh ANRI untuk menghimpun informasi arsip kedalam *Cloud-SIKN* dan memberikan layanan arsip kepada publik melalui *jikn.go.id* dan arsip VOC digital dalam *www.sejarahnusantara.anri.go.id*. Menurut Mustari, saat ini ANRI juga terus berupaya mengembangkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). JIKN berfungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan. Melalui pengelolaan arsip berbasis internet dan cloud computing ini, publik dapat mengakses informasi kapan pun dan dimana pun berada.

“Arsip era 4.0 akan ditandai dengan arsip yang diolah sendiri oleh komputer dan terakses via komputer,” tutur Noerhadi Magetsari, Profesor Emeritus Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UI sekaligus mantan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia pada kuliah umum bertema “Kearsipan dalam Revolusi Industri 4.0”. Era industri 4.0 ditandai dengan berbagai fenomena seperti IoT (internet of things) yang memungkinkan semua mesin berkomunikasi dan saling terhubung, kecerdasan buatan, big data, hingga munculnya label smart untuk pelbagai sektor seperti *smart office*, *smart city*, hingga *smart transportation*. “Kata kuncinya adalah

LAPORAN UTAMA

mampu berkolaborasi antar institusi sehingga menjadi makin efisien,” tambah Noerhadi. Kolaborasi yang terintegrasi dan berbasis pengetahuan akan mampu menghasilkan inovasi terutama dalam mengelola hingga menganalisis big data.

Bagi dunia kearsipan, tambah Noerhadi, bahwa era industri 4.0 membuat hidup arsip menjadi lain tapi prinsip-prinsip pengelolaan arsip masih dapat digunakan. “Soal seleksi dan akses arsip, karena nanti semua berbasis mesin maka protokol di program komputernya yang diatur. Penyeleksian dalam bentuk program berupa sensor. Prinsip-prinsip dunia kearsipan masih dapat digunakan meski nantinya semua berbasis mesin,” tambah Noerhadi. Dengan cara tersebut arsiparis tetap menjadi profesi yang diperlukan di era industri 4.0. “Idealnya memang semua arsip sudah elektronik dan diserahkan ke mesin, tapi faktanya masih ada teks sebagai arsip. Apakah lantas didigitalisasi atau ada langkah lain, arsiparis yang nanti dapat memberi makna,” ungkap Noerhadi.

Dalam konteks global, tidak terpungkiri, peradaban manusia di semua penjuru dunia sedang memasuki lorong globalisasi. Seluruh entitas di dalam peradaban itu sendiri, sedang berjalan di atas landscape perubahan yang sangat cepat karena hadirnya era baru bernama Revolusi industri 4.0. Kecepatan teknologi tidak dapat dihentikan. Era revolusi Industri 4.0 ternyata berdaya ledak 3.000 kali lebih Dahsyat dari pada revolusi industri 1.0, abad 18 silam. Maka, tentu banyak terjadi perubahan, juga termasuk di bidang kearsipan. Jaman batu Palaeolitikum hingga Neolitikum,



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Kearsipan di Makassar, Sulawesi Selatan (25/04).

catatan budaya diukir melalui tulisan dan gambar di atas batu. Jaman presejarah, banyak catatan pada tulang, kulit fosil maupun artefak kuno, seperti penemuan hieroglif oleh bangsa mesir sejak 4000 tahun sm. Di nusantara, ditemukan metode pencatatan daun lotar berhuruf palawa berbahasa sansekerta. Jaman revolusi industri ditemukan tinta dan kertas dimana pengarsipan berujung di tumpukan kertas.

“Sekarang, revolusi digital, maju sangat pesat. Eric Ketelaar menyebutkan arsip telah melampaui batas-batas ilmu kearsipan. Tata kelola kearsipan dipacu mengoptimalkan canggihnya teknologi”, tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin pada acara Rapat Koordinasi Kearsipan di Makassar Sulawesi Selatan (25/04).

Kenneth tibodeau dari U.S. *National Archives and Records Administration*, dalam artikelnnya

yang berjudul “*Building the Archives of the Future*”, mencatat langkah fundamental Amerika Serikat dalam membangun tata kearsipan nasional berbasis teknologi/rekaman elektronik sejak tahun 1970. Adaptasi kearsipan bukan lagi hanya pada bentuk, sistem dan polanya, tetapi juga pada fungsinya yakni menjaga keterhubungan informasi di dalam arsip, dengan aktivitas manusia pada waktu dan jaman arsip itu digunakan, melalui pola distribusi yang serba elektronik. “Artinya, arsip kunopun menjadi elemen yang paling berharga. rekaman di dalam arsip, berupa konten, struktur, konteks dapat menjembatani peradaban dan digunakan hingga di masa depan”, terang Syafruddin.

Syafruddin menambahkan bahwa suatu keniscayaan pengarsipan pada sektor pemerintahan, sektor privat maupun masyarakat haruslah mengimplan teknologi. Contoh: waze & google map seolah berpikir

nyata mengatasi kemacetan dengan menyajikan rekaman data digital jalan untuk pengemudi. Begitu pun Microsoft Cortana yang mengharuskan manusia menginput akses file, surel, data dan aplikasi secara virtual, sehingga artificial intelligence ini mampu memberi saran tentang kegiatan rapat, waktu pertemuan, mengingatkan bila ada kesalahan pengambilan keputusan bisnis di sektor privat. Teknologi Google now & siri memakai algoritma pengetahuan yang terakumulasi secara digital untuk menjawab semua pertanyaan tentang kehidupan sosial manusia. Kindle Amazon mengumpulkan data para pembaca, memantau bagian buku yang dibaca cepat / lambat, hingga menandai bagian kalimat yang berhenti dibaca. Situs, web, cloud dirancang guna menyediakan ruang kearsipan dunia maya tanpa gedung, tanpa bangunan fisik, tanpa areal tanah. "Cukup dengan mengakses internet, arsip itu muncul secara nyata memberikan informasi yang akurat untuk semua kepentingan umat manusia", lanjut mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Syafruddin.

Seluruh negara dunia mengembangkan teknologi untuk membangun raksasa pemerintahan yang menggenggam imperium dunia. Dua negara adidaya seperti AS dan China bersaing hebat bukan di medan peperangan, tetapi di medan teknologi yang mendukung ekonomi dan pemerintahan. Teknologi di China menopang pemerintahan untuk mengembangkan pelayanan publik bertaraf internasional, membangun kerjasama dengan sektor privat sehingga menyerap investasi yang menyangga kapasitas devisa dan

ekonomi negaranya. Arsip - arsip kuno, hasil riset dan penelitian untuk pembangunan diubah menjadi data elektronik yang tersimpan dalam big data, didistribusikan cepat melalui sistem elektronik, semua keputusan kebijakan publik tepat sasaran dengan analisis yang komprehensif dan berorientasi *citizen need centric*. Kepuasan dan kebahagiaan masyarakat meningkat, kepercayaan diri pemerintah pun menguat dalam menjalankan pembangunan.

Amerika Serikat, walaupun dalam struktur yang federal, sistem teknologi kearsipan dibangun secara persisten untuk digunakan aparaturnya masa depan. Rekaman elektronik menjaga kepentingan pemerintah, menyeimbangkan dan menjamin ketersediaan akses data dan informasi yang mendukung kinerja dan fungsi semua entitas kementerian dan lembaga. Arsip mendukung koordinasi dan kinerja kementerian dan lembaga. Sistem kearsipan dibangun dari hasil riset dan penelitian untuk berbagai program pembangunan, pertahanan, keamanan, intelijen, ekonomi, sosial, maupun politik. Walaupun nanti terjadi perubahan drastis, sistem kearsipan rekaman elektronik, tetaplah permanen digunakan untuk menyangga proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik di masa depan.

Denmark, Australia, Korea Selatan, Inggris, Swedia, Finlandia, Singapura, New Zealand, Prancis dan Jepang merupakan top 10 negara dengan indeks pengembangan E-Gov terbaik dunia berdasarkan UN E-Gov survey 2018. "Bulan Juni, saya akan hadir forum pelayanan publik oleh PBB di Azerbaijan sebuah forum yang membahas

praktik terbaik pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berbasis teknologi. Saya ingin "menjual" kepada dunia bahwa program SAKIP Indonesia sekarang sudah menjadi produk tata kelola pemerintahan yang baru di mata internasional, dapat dikembangkan di setiap negara yang punya karakter sama dengan Indonesia. Di dalamnya, tata kelola kearsipan pemerintah berbasis elektronik, menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan program Sakip dan reformasi birokrasi", ungkap Syafruddin dalam sambutan Rakornas Kearsipan.

Syafruddin menegaskan bahwa dengan demikian, tidak ada kata lain bagi Indonesia selain mempercepat pembangunan SPBE secara progresif dan massif di seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah pusat maupun daerah. dalam setiap 20 tahun, terjadi lompatan yaitu 10.000 kali lebih murah untuk transmisi dan penyimpanan data. "Peluang ini harus dimanfaatkan. Lalu, Indonesia tidak boleh tertinggal, seluruh negara maju bukan lagi berpikir membangun *e-government* tetapi lebih komprehensif lagi berupa *smart city* yang makin mengadaptasi modernisasi guna menopang kebijakan publik yang strategis dalam membangun kemajuan negara", terangnya.

Era industri 4.0 adalah keniscayaan yang harus diimbangi dengan kemampuan melakukan adaptasi. Termasuk bagi arsiparis dan calon arsiparis. Arsiparis perlu memahami bagaimana era 4.0 akan mengubah banyak hal termasuk di dunia kearsipan. Karena itu, kesiapan sejak dini dengan membekali diri pada

LAPORAN UTAMA

teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengolahan big data hingga mewujudkan kolaborasi dengan yang lain, menjadi sangat diperlukan.

Di tengah tantangan dunia menghadapi revolusi industri 4.0 ini, penerapan *e-government* bagi penyelenggara negara adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan *e-government*. Digitalisasi tata kelola pemerintahan ini juga merupakan langkah nyata reformasi birokrasi yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik. Seiring perkembangan zaman, birokrasi pemerintahan pun harus beradaptasi. Implementasi *e-government* akan menekan praktik curang dalam birokrasi, seperti pungutan liar, suap menyuap, bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan Perpres tersebut, seluruh penyelenggara negara mulai dari pusat hingga daerah 'dipaksa' untuk menerapkan *e-government* secara terintegrasi sebagai babak baru pengelolaan semua urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat menerapkan SPBE. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, disebutkan salah satu mandat yang harus segera dilaksanakan adalah percepatan SPBE. Tujuannya adalah mempercepat penerapan aplikasi umum berbagi pakai yang terintegrasi



Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini.

kepada seluruh instansi pemerintah.

Dalam hal ini terdapat empat *quick wins* dalam penerapan aplikasi umum. Pertama, integrasi perencanaan, pengadaan, kinerja dan pemantauan evaluasi. Kedua integrasi layanan kepegawaian, ketiga integrasi layanan kearsipan, dan keempat integrasi layanan pengaduan publik. Sementara itu terdapat pula dua *quick wins* dalam hal infrastruktur SPBE, yakni pusat data nasional dan jaringan intra pemerintah.

Sejalan dengan tujuan kearsipan itu sendiri, SPBE akan menghadirkan tata lintas data kearsipan yang terintegrasi, autentik, handal, dinamis, aman, melindungi kepentingan negara bahkan menyajikan berbagai solusi untuk peningkatan kualitas kebijakan publik di segala bidang secara cepat, simultan dan terarah. *E-government* dibutuhkan untuk penguatan sistem dan jaringan informasi kearsipan, area perubahan tata laksana untuk manajemen kearsipan birokrasinya, lalu *open government* dibangun untuk mendukung sistem kearsipan yang

terbuka dan partisipatif.

Menyadari pentingnya kolaborasi dan sinergi antar instansi, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus menggalakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Sinergi antar instansi ini diperlukan agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam penerapan SPBE. "Jadi, supaya masing-masing instansi pemerintah pada nggak bikin aplikasi-aplikasi yang empat *quick win* tadi. Karena sudah banyak yang bikin. Untuk kearsipan internal dia bikin, untuk kepegawaiannya bikin. Jadi, sudah ngga usah lagi itu. Kalau yang sudah terlanjur seperti yang saya bilang, nanti Kominfo akan mengatur sedemikian. Kita kan karena Menpan tidak berbicara teknik aplikasinya, tapi bisa katanya dilakukan nanti interpretability-nya dengan sistem yang akan dibangun", Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini.

Pengelolaan arsip yang terintegrasi dalam *e-office* merupakan bagian penting dalam Perpres SPBE. Maka, Penerapan *e-government* di bidang kearsipan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban dan kebutuhan. Dengan demikian, daur hidup arsip dapat berkelanjutan. Arsip bukan lagi sekedar catatan historis, bukan pula hanya menjalankan fungsi dukungan kesekretariatan dari suatu organisasi pemerintahan. Kearsipan adalah unsur utama yang integral dalam keseluruhan upaya membangun pemerintahan modern. (is)

Jajang Nurjaman

MENAKAR MASA DEPAN KEARSIPAN INDONESIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Dua puluh tahun lalu, kita membayangkan dapat berkomunikasi dengan kerabat kita, atau kolega kita yang berada ribuan kilometer jauhnya, hanya dengan menggunakan arloji kita. Hal yang pada saat itu, mungkin mustahil dilakukan, kini bisa kita lakukan dengan sentuhan jari. Kemajuan di bidang teknologi dan informasi, telah membawa perubahan yang cukup cepat dan drastis di segala lini kehidupan. Kita kini tidak asing melihat seseorang sibuk dengan gawainya, dan beberapa detik kemudian orang tersebut sudah dijemput oleh pengemudi ojek yang sudah ia pesan lewat aplikasi digawainya. Ilustrasi tersebut dapat menggambarkan saat ini kita hidup di zaman revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 telah mengubah dunia yang dahulu sering diistilahkan luasnya tak sesempit daun kelor, kini benar-benar menjadi sesempit daun kelor. Dunia kearsipan, juga dengan sendirinya akan menyesuaikan perkembangan zaman ini. Artikel ini akan membahas bagaimana revolusi industri 4.0 telah mengubah wajah dunia, dan kedua akan membahas tantangan-tantangan dunia kearsipan, khususnya kearsipan di Indonesia, dalam menjalani era revolusi industri 4.0.

Dunia yang Bergerak Cepat

Dalam sebuah novelnya yang berjudul *Thirteen Reasons Why*, Jay Asher berujar, “*You can’t stop the future. You can’t rewind the past. The only way to learn the secret...is to press play.*”. Dari kutipan ini kita belajar bahwa manusia tidak bisa mencegah datangnya masa depan, dan kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, satu-

satunya cara untuk mempelajarinya adalah dengan menjalani masa depan tersebut. Luciano Floridi dalam bukunya yang berjudul *The Fourth Revolution; how the Infosphere is reshaping human reality* (Oxford, 2014), menyebut era revolusi industri 4.0 sebagai eranya teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampaknya pada diri kita semua, era nya bagaimana kita berhubungan dengan dunia dan membentuk dunia kita. *Nanotechnology, the Internet of*

Things, Web2.0, Semantic Web, cloud computing, smartphone apps, tablets dan hal lainnya yang berbau layer sentuh, GPS, *Augmented Reality, artificial companions*, pesawat tak berawak, mobil tak bersupir, *wearable computing devices, 3D printers, identity theft*, kursus-kursus daring, media sosial, perang siber,... dan apa lagi selanjutnya? Belum habis kekaguman kita melihat bagaimana perusahaan mesin pencari google menciptakan mobil tak bersupir, kita sudah disuguhi lagi dengan penemuan perusahaan tesla yang memungkinkan manusia untuk tur ke bulan. Teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) telah menyatu dalam diri kita. Manusia, sudah tidak bisa lepas lagi dari perkembangan TIK. Revolusi industry 4.0 telah membentuk sebuah alam baru yang disebut Floridi sebagai *infosphere, information atmosphere*.

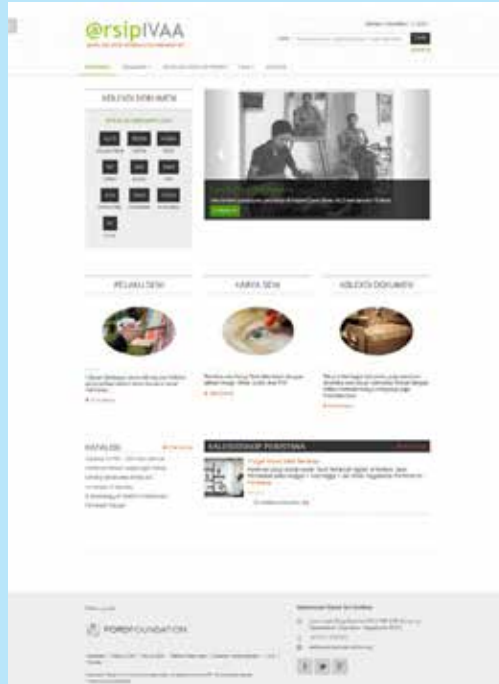
Revolusi industri 4.0 telah mengubah cara kita bekerja, hidup, dan berkomunikasi. Revolusi ini telah mereformasi bidang-bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan, bahkan semua

ARTIKEL LAPORAN UTAMA

bidang kehidupan. Revolusi ini dapat mengubah dunia ke arah yang lebih positif, namun juga bisa ke arah yang lebih buruk. Teknologi-teknologi baru yang ditemukan dapat menjadi perantara untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Pendidikan dan akses ke informasi dapat meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Jaringan dan teknologi komputer yang mumpuni lalu dibarengi dengan adanya teknologi *mobile smartphone* dan juga layanan-layanan digital lainnya, telah membuat masyarakat, bahkan di negara berkembang, melek akan perkembangan yang terjadi di belahan dunia manapun.

Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Tencent, telah memudahkan orang untuk melihat apa yang menjadi bincangan kekinian pada waktu saat itu juga dan pada tempat yang jauh sekalipun dari pengguna *platform* tersebut. Para pengguna saling bertukar informasi tanpa batasan ruang dan waktu. Inovasi-inovasi ini bisa menciptakan sebuah komunitas yang dikenal sebagai *global village*. Dari komunitas besar ini, lahirlah beragam inovasi teknologi yang dapat memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya. Dari sini, revolusi industri 4.0 telah dan dapat memberikan dampak positifnya terhadap manusia.

Selain perubahan positif yang diakibatkan oleh revolusi industri 4.0, ada juga dampak negatif yang diberikan dari revolusi industri 4.0. Teknologi dapat memberikan dampak negatif jika kita tidak berpikir tentang bagaimana teknologi itu mengubah kita. Max Tegmark, seorang fisikawan dan ahli metafisika dari Royal Institute of Technology UC Berkeley mengatakan, "*We have to win this race between the growing power of the technology, and the growing wisdom with which we manage it. We don't want to learn from mistakes.*". Artinya kita, sebagai manusia, harus memiliki hubungan yang erat dengan teknologi, kita harus mengembangkan teknologi dengan bijak. Contohnya,



Tampilan website Indonesian Visual Art Archive, <http://archive.ivaa-online.org/>, yang memungkinkan pengguna melihat arsip secara visual. Diakses 21 Mei 2019

perkembangan bioteknologi yang sempat membuat geger dunia: uji coba kloning pada manusia. Uji coba ini mengundang banyak kontroversi karena dapat merusak jalur silsilah seseorang. Lain lagi dengan semakin canggihnya teknologi yang dapat menggantikan peranan manusia. Kecanggihan ini dapat berdampak pada hilangnya beberapa bidang pekerjaan yang dahulu dilakukan oleh manusia, kini hanya cukup dengan kecerdasan intelektual atau juga dengan teknologi robotik. Media sosial memang memudahkan kita untuk berkomunikasi, namun juga bisa menimbulkan hal-hal negatif seperti ujaran kebencian, ajakan berbuat tindak pidana, serta penyebaran berita bohong atau hoaks.

Era revolusi industri 4.0, di masa depan bukan hanya mengubah cara kita hidup dengan berbagai macam perkembangan teknologi, tetapi juga akan mengubah hal-hal yang kita nilai (*changing the things that we value*) dan bagaimana kita serta cara kita menilai hal-hal tersebut (*the way*

how to value the things). Revolusi ini akan mengubah hubungan antar manusia dengan manusia, mengubah kesempatan-kesempatan yang ada, mengubah identitas kita sejalan dengan teknologi yang mengubah dunia tempat kita tinggal secara fisik dan virtual, dan bahkan dalam beberapa kasus, revolusi industri 4.0 dapat juga mengubah tubuh kita.

Keartisan Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0 dan Tantangannya

Dunia keartisan telah berubah secara substansial dari generasi yang lalu. Seorang arsiparis senior pernah bercerita kepada saya, bahwa saat itu ia terlibat dalam alihmedia dari kertas ke bentuk mikro. Teknologi tersebut pada masanya sangat terkenal, dan bisa digunakan dalam rangka preservasi arsip dan juga layanan. Namun, ketika bentuk mikro tersebut digunakan masa sekarang, maka yang terjadi adalah sulit menemukan alat bacanya, atau bahkan sudah digantikan dengan teknologi lain. Contoh lain adalah ketika mengolah arsip statis. Dahulu,

arsiparis mendeskripsi menggunakan kartu-kartu deskripsi, tetapi kini sudah menggunakan perangkat lunak komputer, baik itu *stand-alone software* atau *web based software*.

Di era revolusi industri 4.0, hampir tidak ada arsiparis yang bekerja tidak dengan menatap layar komputer. Hampir semua pekerjaan arsiparis kini dilakukan dengan bantuan kemajuan teknologi. Perubahan cara kerja arsiparis, mau tidak mau, menggeser bidang-bidang kearsipan yang dikerjakan secara manual menjadi dengan bantuan perkembangan TIK. Dengan kemajuan teknologi, banyak hal telah berubah. Sebuah masyarakat, yang sering dinamakan *information society*, telah terbentuk dengan sendirinya. Masyarakat sekarang berkeinginan untuk dapat mengakses arsip dari manapun mereka berada. Ekosistem kearsipan yang tadinya hanya berupa sebuah bangunan fisik yang statis, kini menjadi bangunan virtual yang dapat dikunjungi pada saat masyarakat terkoneksi dengan sebuah sistem.

Perubahan besar yang terjadi pada dunia kearsipan secara umum, menurut pendapat penulis, adalah lembaga kearsipan dan juga komunitas kearsipan lainnya, lebih terbuka terhadap para pengguna arsipnya dan mendigitalisasi arsip konvensional sehingga bisa lebih dapat diakses. Perubahan lainnya adalah, banyak lembaga kearsipan atau komunitas kearsipan lainnya yang mulai aktif menjangkau masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatannya. Sebagai contoh, misalnya sebuah komunitas kearsipan yang menamakan dirinya *Indonesian Visual Art Archives* pernah mengadakan acara bertajuk Festival Arsip yang melibatkan masyarakat. Contoh lainnya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia yang mengadakan sayembara maskot arsip yang juga melibatkan masyarakat sehingga lembaga ini bisa lebih dikenal di masyarakat. Informasi-informasi tersebut cepat menjadi viral karena memanfaatkan ekosistem digital salah satunya melalui *platform* media sosial.

Arsip yang berbentuk digital juga telah memberikan dampak pada lembaga kearsipan dan komunitas kearsipan. Dampak tersebut adalah ketika arsipnya sudah digital, lalu muncul pertanyaan lanjutannya: Bagaimana arsip tersebut dipelihara? Bagaimana arsip tersebut dideskripsi? Bagaimana memasukan metadata hingga bisa diakses melalui mesin pencari?

Maka, ada banyak tantangan yang dihadapi dunia kearsipan Indonesia di era revolusi industri 4.0 ini. Penulis berpendapat ada tiga tantangan besar di era revolusi industri 4.0 untuk kearsipan Indonesia, yaitu di bidang preservasi digital, pengolahan arsip digital, dan penggunaan *artificial intelligence* di dunia kearsipan.

Preservasi digital di beberapa lembaga kearsipan memang sudah dilakukan, tetapi hanya sebatas mengalihmediakan bentuk arsip konvensional ke arsip digital. Belum pada tataran mendeskripsinya lalu sampai bisa diakses publik. Kini, orang ingin informasi dapat cepat diakses dan dinikmati. Dengan kemajuan teknologi, sejatinya lembaga kearsipan ataupun komunitas kearsipan mudah untuk mewujudkan hal tersebut.

Selain tiga hal di atas yang menjadi tantangan, ada satu tantangan lagi yang sempat disinggung di bagian awal tulisan ini. Salah satu produk dari revolusi industri 4.0 adalah hal-hal yang berbau internet, bisa *internet of things*, bisa juga *robotics* atau aplikasi-aplikasi berbasis internet. Internet telah menjadi kudapan *information society*. Dalam dunia kearsipan, internet juga menjadi bidang yang terus digali oleh penggelut kearsipan. Bagaimana kita bisa mengarsipkan internet atau sebuah media sosial? Sejauh ini belum ada *tools* atau metode yang bisa digunakan untuk mengarsipkan *web*. Memang ada *tools* yang sudah bisa untuk menyimpan keseluruhan halaman *web*, tetapi untuk melestarikan internet dalam hal bagaimana melihat proses bisnis di dalamnya, masih belum ada. Media



Salah satu usaha ANRI dalam memajukan penggunaannya melalui website www.sejarah-nusantara.anri.go.id, yang memudahkan mencari arsip melalui search engine.

ARTIKEL LAPORAN UTAMA

sosial, *website*, internet, selalu dengan konstan mengalami perubahan. Selalu ada penambahan ataupun pengurangan informasi di sana sini, seperti makhluk hidup yang selalu berubah. Teknologi baru, kontributor, dan konsepnya selalu ditambah ataupun dikurangi. Di Indonesia, belum ada contoh komunitas kearsipan yang mengarsipkan internet, namun di Amerika Serikat bisa dilihat kegiatan yang dilakukan oleh Internet *Archive*. Organisasi ini mengarsipkan sebanyak mungkin *website* dengan perbandingan 1:1, namun belum kepada proses bisnisnya.

Lalu bagaimana atau hal apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan di era revolusi industri 4.0 tadi? Di negara seperti Indonesia, yaitu negara yang bisa dikatakan masih dalam proses transisi dari analog ke digital, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut guna menghadapi tantangan kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0:

1. Alur kerja untuk pengelolaan arsip: Lembaga kearsipan (misalnya ANRI) mengotomasikan pekerjaan-pekerjaan kearsipan; tidak sebatas dengan membangun banyak aplikasi tetapi tidak ada *electronic archivall records management system*-nya;

2. Membuat inventaris digital dengan cara bereksperimen dengan basis data, aplikasi pengolahan kata, dan lalu dipublikasikan *online*;

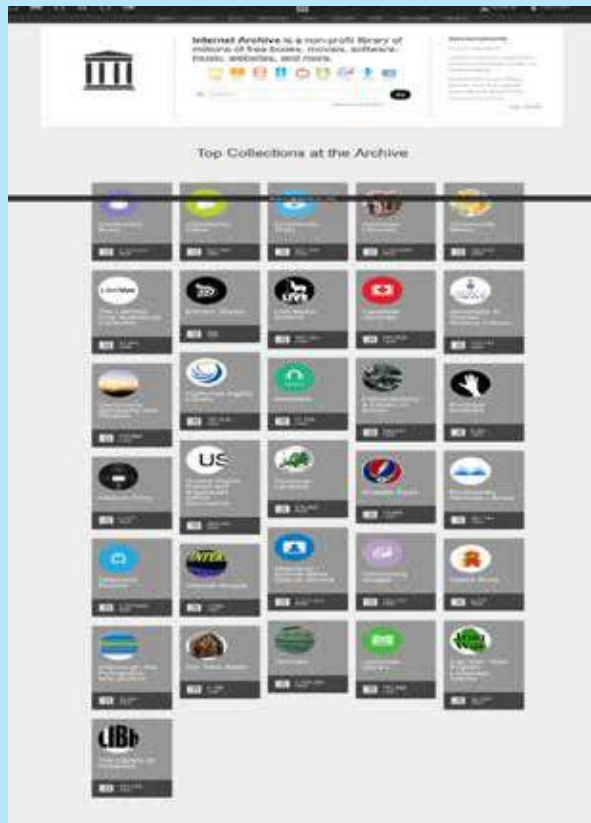
3. Digitalisasi arsip sebagai metode preservasi dan akses;

4. Akuisisi arsip terlahir digital ketika pencipta arsip sudah melahirkan dan menyimpan arsip elektronik.

Empat tahapan di atas diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan yang sebelumnya telah dijabarkan.

Kesimpulan: Masa Depan Kearsipan Indonesia

Pramoedya Ananta Toer pernah berujar “Saya selalu percaya--dan ini lebih merupakan sesuatu yang mistis--bahwa hari esok akan lebih



Tampilan website Internet Archive, bisa dilihat di <http://archive.org>, diakses 21 Mei 2019

baik dari hari sekarang.” Melihat perkembangan kearsipan Indonesia, penulis berkesimpulan bahwa dunia kearsipan di Indonesia sekarang ada di tahapan transisi menuju *Electronic Recordkeeping*. Secara global, Indonesia masih berada di *hybrid environment* yang masih mempertahankan bentuk analog dari bentuk asli yang terlahir digital.

Konsep *e-government* sebetulnya telah ada sejak tahun 2001 ketika Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Namun dalam perjalanannya inisiatif pemerintah pusat ini tidak mendapat dukungan serta respon dari segenap pemangku kepentingan pemerintah yaitu ditandai dengan pemanfaatan

teknologi informasi yang belum maksimal. Titik mula ini kemudian berkembang hingga sekarang. Seharusnya, dengan adanya regulasi dari pemerintah mengenai *e-government*, akan banyak tercipta arsip yang terlahir digital, dan tentu saja akan memanfaatkan industri 4.0. *Electronic Recordkeeping* seharusnya sudah dapat tercipta dengan memperhatikan banyaknya regulasi yang mendukung terciptanya arsip elektronik.

Penulis berkesimpulan bahwa masa depan dunia kearsipan Indonesia (dan juga dunia secara umum), masih akan berkutat pada menciptakan tools untuk mengelola arsip elektronik, namun masih berkutat di *hybrid environment*. Dengan kata lain, masih berada di tataran mencari bentuk ideal *electronic recordkeeping system*-nya.

Gayatri Kusumawardani

PERAN SERTA PT TELKOM TERHADAP PERKEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Apa yang ada dibenak kita ketika membicarakan tentang Telkom? Telepon umum koin di pinggir jalan, Boks Warung Telepon (Wartel) yang *trend* di era 1990-an, atau telegram indah yang diterima setiap hari raya dan hari-hari penting.

Pernahkah kita membayangkan hidup tanpa komunikasi? Hidup bagaikan katak dalam tempurung alias tidak berkembang karena kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Komunikasi merupakan salah satu cara manusia sebagai makhluk sosial untuk bersosialisasi. Salah satu sarana dalam komunikasi adalah perangkat telekomunikasi. Perangkat telekomunikasi diperlukan dalam kita berkomunikasi apabila kita terpisah dengan jarak dan waktu. Di zaman yang serba canggih sekarang ini, perangkat telekomunikasi sangat diperlukan untuk berbagai macam kepentingan. Kemajuan teknologi saat ini tak dapat dihindari dan dibuktikan dengan hadirnya telepon pintar atau *smartphone*.

Di Indonesia, banyak ragam telepon pintar yang diperjualbelikan. Dalam hitungan tidak sampai setahun, produsen-produsen telepon pintar rajin mengeluarkan produk-produk baru yang semakin canggih. Alat



Satelit Palapa A1 diluncurkan di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat
Sumber : ANRI, Inventaris Arsip PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk 1966 - 2006, Arsip Audio Visual, Telkom 4

telekomunikasi saat ini seperti sudah menjadi suatu kebutuhan hidup, tanpa alat telekomunikasi kita bisa “mati gaya”. Pernahkah anda berpikir, bagaimana bisa alat telekomunikasi bisa sampai ada di Indonesia dan berkembang pesat? Pernahkah anda membayangkan bagaimana sejarah alat telekomunikasi bisa sampai ada di Indonesia?

Pada tulisan ini akan dibahas sekilas tentang sejarah telekomunikasi

di Indonesia. Sebelum membahas hal tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang definisi telekomunikasi. Menurut Hidayatullah (2008) menyebutkan bahwa telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas tiga: pertama, komunikasi satu arah (*simplex*) di

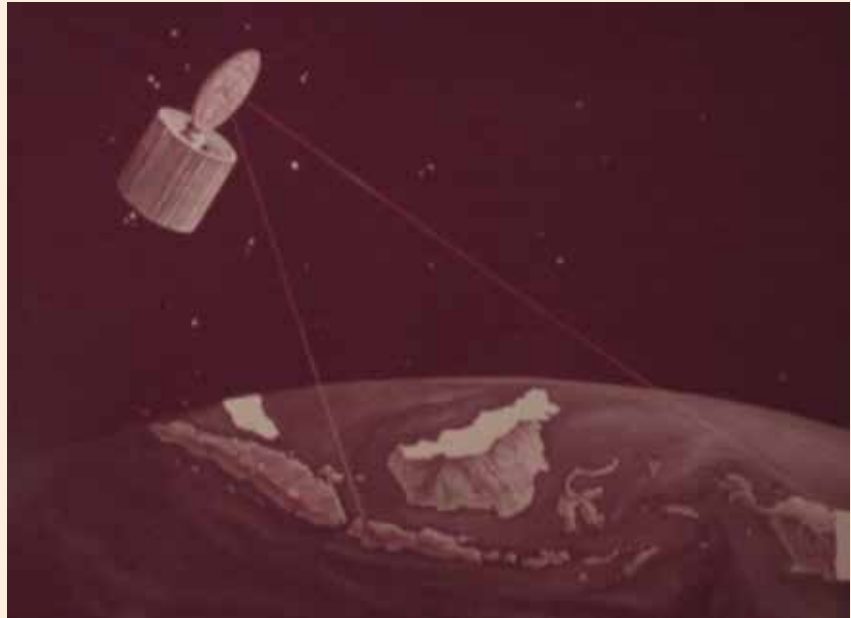
KHAZANAH

mana dalam komunikasi satu arah (simplex) ini pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, contoh : pager, televisi, dan radio. Kedua, komunikasi dua arah (*Duplex*), dalam komunikasi dua arah pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, contoh : telepon dan Voice of Internet Protocol (VoIP). Ketiga, komunikasi semi dua arah (*Half Duplex*), dalam komunikasi semi dua arah, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan, contoh : handy talkie, faximile, dan *chat room*.

Sejarah telekomunikasi di Indonesia bermula saat telegraf diperkenalkan 23 Oktober 1855 oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu berupa telegraf elektromagnet yang menghubungkan Batavia (Jakarta) dan Buitenzorg (Bogor). Dua tahun kemudian dibuka saluran Jakarta-Surabaya dengan cabang Semarang-Ambarawa. Selang dua tahun kemudian panjang saluran telegraf berkembang terus sehingga mencapai 2.700 kilometer, dilayani oleh 28 kantor telegraf. Di sepanjang rel kereta api didirikan tiang-tiang telegraf. Sementara itu kabel laut telah terpasang antara Jakarta dan Singapura, selanjutnya dari Jawa (Banyuwangi) ke Australia (Darwin).

Keberadaan telekomunikasi sangat berperan di Indonesia. Hal ini bisa direfleksikan ketika mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Berbagai media komunikasi digunakan untuk menyebarkan kabar kemerdekaan mulai dari surat, telegram, berita di koran/buletin hingga telepon, serta siaran melalui Radio Republik Indonesia (RRI).

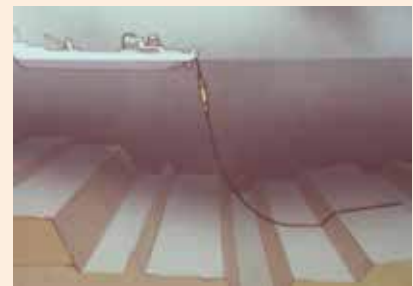
Telekomunikasi menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia.



Gambaran Sistem Transmisi Satelit Palapa
Sumber : ANRI, Inventaris Arsip PT. Telkom 1966 - 2006, Arsip Audio Visual, Telkom 4



Stasiun Bumi Cibinong Sebagai
Penerimaan Sistem Transmisi Satelit
Palapa
Sumber : ANRI, Inventaris Arsip PT.
Telkom 1966 - 2006, Arsip Audio
Visual, Telkom 4



Gambaran Kabel Bawah Laut
Sumber : ANRI, Inventaris Arsip PT.
Telkom 1966 - 2006, Arsip Audio
Visual, Telkom 4

Mulai dari zaman revolusi hingga kemerdekaan kemudian berkembang di masa pemerintahan Presiden Sukarno dan mengalami kemajuan pesat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kemajuan pesat telekomunikasi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ditandai dengan peluncuran satelit Palapa 1 pada tahun 1976. Saat itu sempat terjadi pro kontra, tetapi pada akhirnya harus diakui satelit Palapa banyak memberikan manfaat.

Satelit palapa diluncurkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang ketika zaman pemerintahan Hindia Belanda disebut sebagai *Post, Telegraaf en Telefoon Dienst*, ini merupakan cikal bakal PT. Telkom.

Sejarah telekomunikasi di Indonesia tidak terlepas dari peran PT. Telkom. PT. Telkom adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Berdasarkan sejarahnya, PT.

Telkom telah mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi. Bermula dengan terbentuknya Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi) yang merupakan pemecahan dari Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) pada tahun 1965.

Peluncuran satelit Palapa merupakan salah satu momentum bagi telekomunikasi di Indonesia. Dalam buku *Jalan Ke Bogor; Palapa dan Wanita Papua*, Klaus G. Johansen (2004) menyebutkan bahwa “Peluncuran Satelit Palapa merupakan peristiwa nasional yang memiliki arti besar untuk Indonesia. Proyek pemerintah dengan gengsi Nasional”. Satelit ini berhasil memangkas jarak komunikasi antar daerah di Indonesia yang memiliki wilayah luas. Bahkan pada era Presiden Soeharto hal ini menjadi salah satu misi pembangunan nasional.

Ini berawal dari keinginan pemerintah Indonesia untuk memiliki satelit sendiri yang dapat menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia dengan cepat dan efisien, pada 5 Juli 1974 Indonesia melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan asal Amerika Serikat, Hughes Aircraft Company. Demikian tercatat dalam buku *Mengenang Sewindu SKSD Palapa* (1984) terbitan Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.

Satelit yang diimpikan itu pun selesai digarap pada Februari 1975. Dinamakan satelit Palapa oleh Presiden Soekarno untuk mengingatkan sejarah akan sumpah palapa Mahapatih Gajah Mada yang tidak akan makan buah Palapa sebelum persatuan dan kesatuan Majapahit menjadi kenyataan. Satelit perdana ini diklaim mampu menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan hingga negara tetangga, termasuk Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.



Proses Pengerjaan Pemasangan Kabel Bawah Laut
Sumber : ANRI, Inventaris Arsip PT. Telkom 1966 - 2006, Arsip Audio Visual, Telkom 4



Pertemuan ASEAN Membahas Kabel Lintas Laut
Sumber : ANRI, Inventaris Arsip PT. Telkom 1966 - 2006, Arsip Audio Visual, Telkom 4

Tanggal 8 Juli 1976 dipilih sebagai hari peluncuran, di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, pukul 19.30 waktu setempat. Palapa A1 diluncurkan lantas mengorbit dengan sukses di atas Samudera Hindia. Sebuah pencapaian yang membanggakan mengingat pada waktu itu masih sedikit negara yang memiliki satelit domestik.

Semula satelit Palapa dikelola oleh Perumtel atau PT. Telkom saat ini. Belakangan, berdiri pula PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) yang ikut mengelola satelit Palapa. Tercatat satelit Palapa pertama adalah A1, yang diluncurkan pada 1978, kemudian pensiun pada 1983. Selain A1, ada juga A2 yang diluncurkan pada 1977 dan pensiun pada 1988. Hingga kini

satelit Palapa berkali-kali ganti. Selain PT. Telkom dan Satelindo, belakangan Indosat juga ikut mengelola satelit.

Salah satu fungsi satelit palapa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia adalah siaran televisi. Televisi Republik Indonesia (TVRI) bisa mengudara melalui satelit Palapa dari Sabang sampai Merauke. Bahkan bukan hanya TVRI, satelit ini juga berperan pada lahirnya tiga stasiun televisi swasta lainnya di Indonesia yaitu Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV) dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). *“Berkas di Jakarta, Bandung dan Surabaya, ketiga saluran televisi sekarang berskala nasional berkat menggunakan satelit Palapa,” tulis David T Hill dalam Pers di Masa pemerintahan Presiden Soeharto (2011).*

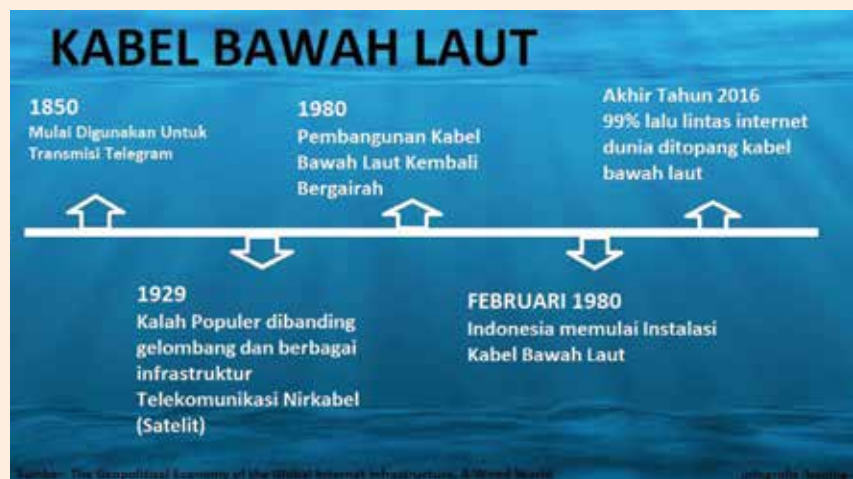
Salah satu tonggak telekomunikasi yang juga merupakan cikal bakal modernisasi telekomunikasi adalah adanya pembangunan kabel bawah laut. Pemerintah Indonesia, seperti dicatat Bondan Winarno (2012), pada 1976 juga membangun proyek kabel bawah laut antara Medan dengan Penang.

Pada bulan Februari 1980 Perumtel berhasil membangun sarana transmisi kabel Intas laut Indonesia Singapura atau dikenal dengan Sistem Komuniaksi Lintas Laut bagian ASEAN (SKKL Indonesia-Singapura). Jaringan kabel bawah laut membentang antara Pantai Ancol hingga Pantai Katong, Singapura sepanjang 1090 Km. (ANRI, Inventaris Arsip PT. Telkom Tbk 1966 - 2006, Arsip Audio Visual, Telkom 4)

Kabel lintas laut sebagai infrastruktur telekomunikasi mulai digunakan pada tahun 1850. Awalnya kabel lintas laut digunakan untuk sarana komunikasi telegram. Seiring perkembangannya sempat terjadi pasang surut, sempat tergeser oleh



Jangkauan Kabel Lintas Laut
 Sumber Gambar : ANRI, Inventaris Arsip PT. Telkom 1966 - 2006, Arsip Audio Visual, Telkom 4



Infografis Kabel Bawah Laut

gelombang radio dan telekomunikasi nirkabel (satelit). Akhir tahun 2016 tercatat lalu lintas internet dunia ditopang oleh kabel bawah laut sepanjang 1,3 Juta Km dari 356 perusahaan. (The Geopolitical Economy of the Global Internet Infrastructure. A Wired World)

Infrastruktur yang dikembangkan oleh PT Telkom dalam menjawab perkembangan industri telekomunikasi dunia merupakan jawaban dari kesiapan Indonesia sebagai negara yang bukan hanya sebagai negara

pengikut. Di kemudian hari kita harus siap, bagaimana perkembangan dan arus dunia berjalan. Selamat datang di era Revolusi Industri 4.0.

Namun saat ini khazanah arsip PT. Telkom yang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia yang membahas tentang satelit Palapa dan kabel lintas bawah laut hanyalah dalam bentuk film, yang mayoritas tanpa suara. Sedangkan untuk arsip tekstualnya masih belum ada yang secara khusus membahas tentang substansi satelit Palapa dan kabel lintas bawah laut.

PEMILU 1955 DAN PARA PENYELENGGARANYA

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan hajatan politik lima tahunan yang rutin dilaksanakan di Indonesia. Meski telah rutin dilaksanakan, namun dalam setiap pemilu selalu terjadi dinamika yang di luar dugaan yang mewarnai jalannya pesta demokrasi tersebut. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pihak penyelenggara pemilu dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan persoalan yang muncul selama pemilu. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana penyelenggara Pemilu 1955.

Pemilu 1955 bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Pemilihan anggota DPR dilaksanakan pada 29 September 1955, sedangkan pemilihan anggota Konstituante baru dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pemilu 1955 diikuti oleh 172 kontestan yang terdiri atas partai politik, organisasi massa, dan perorangan. Mereka memperebutkan 257 kursi DPR dan 514 kursi Konstituante.

Tulang punggung pemerintah dalam merencanakan Pemilu 1955 adalah Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kantor Pemilihan Pusat. Penyelenggara Pemilu 1955 ada dua, yaitu Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pemeriksaan. Tentu saja model kepanitiaan seperti itu terlihat



Seorang ibu sedang memberikan hak suaranya pada Pemilu DPR tanggal 29 September 1955

Sumber: ANRI, Kempen 550929 FH 4

sangat sederhana jika dibanding dengan Pemilu 2019 yang terdiri atas tiga lembaga, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPPP). Berikut ini akan dijelaskan mengenai tugas lembaga penyelenggara Pemilu 1955.

Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)

Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR ditunjuk suatu badan penyelenggara pemilu. Badan tersebut diberi nama PPI yang bertugas mempersiapkan, memimpin, dan menyelenggarakan pemilihan anggota DPR dan Konstituante. Berikut ini struktur penyelenggara Pemilu 1955:

a. Berdasarkan Pasal 20, PPI bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang dengan masa kerja 4 (empat) tahun. Anggota PPI dilantik dan diberhentikan oleh presiden.

b. Berdasarkan Pasal 21, Panitia Pemilihan (PP) dibentuk di setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota dengan masa kerja 4 (empat) tahun. Anggota PP dilantik dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.

c. Berdasarkan Pasal 22, Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dibentuk di setiap kabupaten dengan tugas membantu PP mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota dengan masa kerja 4 (empat) tahun. PPK diketuai oleh bupati sekaligus merangkap anggota. PPK dilantik dan diberhentikan oleh gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

d. Berdasarkan Pasal 23, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk di setiap kecamatan dengan tugas mengesahkan daftar pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR, serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS



Dasar hukum Pemilu 1955 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR
 Sumber: ANRI, Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum 1949 – 2005

sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan camat karena jabatannya menjadi Ketua PPS merangkap anggota. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri. Masa jabatan PPS ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

e. Berdasarkan Pasal 24, Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP) dibentuk di setiap desa. Keanggotaan PPP sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Kepala desa karena jabatannya menjadi ketua merangkap anggota PPP. Anggota PPP dilantik oleh camat atas nama Menteri Dalam Negeri. Masa jabatan PPP ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Upaya pembentukan PPI sebenarnya telah diupayakan oleh Kabinet Wilopo. Pada saat itu PPI diketuai oleh Mr. Assaat (nonpartai), tetapi terkatung-katung karena tidak dicapai kata sepakat dari partai-partai koalisi yang ada di kabinet mengenai susunan kepengurusannya. Baru ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo

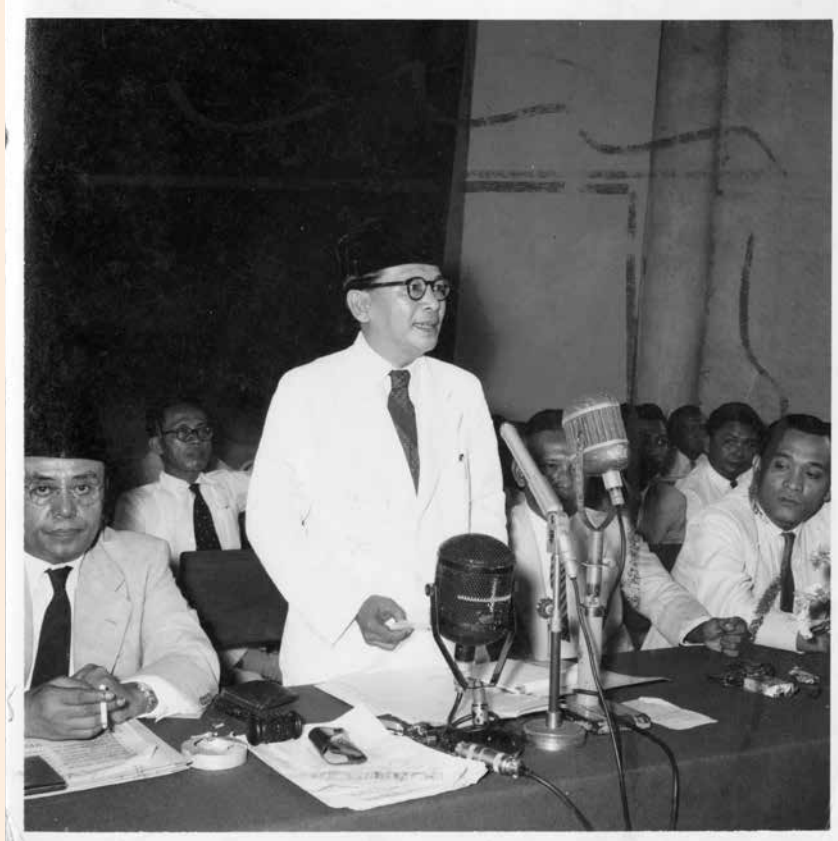
berkuasa dilakukan penggantian kepengurusan PPI. PPI kemudian diketuai oleh Sukri Hadikusumo dari Partai Nasional Indonesia (PNI), jabatan wakil ketua dipegang oleh Rustam Sutan Palindih (PNI), Sudarnadi dari Persatuan Indonesia Raya (PIR-Hazairin), Surjaningprodjo dari Nahdlatul Ulama (NU), Sudibjo dari Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), H. Sofjan Siradj dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Soemarto dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Hartojo dari Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Asraruddin (Partai Buruh). Susunan kepengurusan PPI ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan PPI tanggal 7 November 1953. Sayangnya partai-partai yang beroposisi terhadap Kabinet Ali Sastroamidjojo tidak memiliki wakil dalam PPI. Pada tanggal 3 Desember 1953 dilakukan serah terima tugas persiapan pemilu dari KPP kepada PPI.

Netralitas PPI dan jajarannya

dalam menyelenggarakan Pemilu 1955 memang pantas dipertanyakan. Hal itu disebabkan besarnya peran pemerintah dan partai-partai pendukungnya dalam PPI dan jajarannya di tingkat daerah. Dimasukkannya para kepala daerah sebagai Ketua PPK, PPS, dan PPP sangat menguntungkan PNI yang saat itu menjadi partai yang mendominasi jabatan pemerintahan. Bukan hanya dalam pembentukan PPI, dominasi partai koalisi pemerintah juga terlihat dalam pembentukan PP di tingkat provinsi. Dalam kasus di Sumatera Tengah, Partai Adat Rakyat memprotes keras susunan PP di provinsi tersebut yang dianggap hanya menguntungkan koalisi Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin.

Oleh karena anggota PPI berasal dari partai politik, maka mereka juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pada waktu itu memang tidak ada aturan yang melarang anggota PPI mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Namun akal sehat kita bisa menilai bagaimana bisa seseorang berbuat adil ketika menjadi wasit sekaligus pemain dalam pertandingan yang sama. Sebagai contoh Ketua PPI Sukri Hadikusumo yang merupakan kader PNI terpilih menjadi anggota Konstituante dari daerah pemilihan Jawa Tengah.

Pada Pemilu 1955 kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu juga terjadi. Hal itu terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) V dan VI Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Pada saat pemilihan anggota DPR, warga yang akan mencoblos telah melihat adanya lubang



Ketua PPI Sukri Hadikusumo sedang mengumumkan secara resmi hasil pemilihan anggota DPR, tanggal 1 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 3

samar-samar di surat suara. Hal itu kemudian disampaikan kepada PPPS dan minta diganti, namun oleh PPPS dinyatakan lubang tersebut samar dan surat suara tidak perlu diganti. Tetapi ketika dilakukan penghitungan, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Hal itu menyebabkan sekitar 1.400 surat suara tidak dihitung. NU sebagai partai mayoritas di wilayah itu merasa dirugikan. Oleh karena itu, NU Cabang Glenmore melayangkan protes dan meminta agar pemilihan anggota DPR di TPS V dan VI desa Kalibaru Manis diulang kembali. Seperti yang diberitakan *Antara* pada 20 Oktober 1955.

Pelanggaran terhadap aturan pemilu juga terjadi di kota Makassar. Setelah proses penghitungan

suara untuk kota Makassar selesai, bungkusan surat suara tidak langsung diserahkan ke Panitia Pemungutan Daerah (PPD) XII. Namun bungkusan surat suara tersebut diinapkan di rumah Ketua PPS kota Makassar selama dua hari. Selama berada di tempat tersebut bungkusan surat suara dibuka dan disortir oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Sebagai respon atas kejadian tersebut, 12 partai dan organisasi massa di kota Makassar menyatakan menolak hasil pemungutan suara di kota Makassar. Partai dan organisasi massa yang menyatakan penolakan sebagai berikut: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), PIR Hazairin, Partai Rakyat Nasional (PRN), PNI, PKI, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Gerakan Buruh dan Tani, Persatuan Kemakmuran

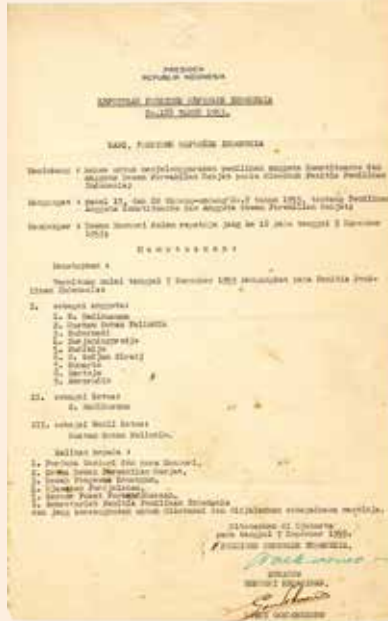
KHAZANAH

Indonesia Sulawesi, Gerakan Pembela Pancasila, Persatuan Tani Nasional Indonesia, Badan Perjuangan Buruh, dan Biro Pejuang Pembangun Republik Indonesia. Kejadian tersebut dimuat dalam berita Antara tanggal 19 Oktober 1955.

Panitia Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 104 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953, pemerintah harus membentuk satu panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan administrasi terhadap para calon anggota DPR dan Konstituante yang terpilih maupun ditunjuk. Setelah persyaratan seorang anggota legislatif dinyatakan lengkap oleh Panitia Pemeriksaan, maka ia baru bisa dilantik. Panitia Pemeriksaan terdiri atas lima orang yang berasal dari perwakilan partai politik.

Pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) pada 26 November 1955 pagi mengumumkan pembentukan Panitia Pemeriksaan. Tokoh-tokoh yang diangkat sebagai anggota Panitia Pemeriksaan adalah Prawoto Mangkusasmito (Masyumi), Arudji Kartawinata (PSII), Mr. A.M. Tambunan (Parkindo), Zainul Arifin (NU), dan I.B.P. Manuabe (PNI). Meski belum diumumkan secara resmi, namun pada minggu kedua bulan Oktober 1955 telah diketahui hasil perolehan suara Pemilu 1955. Pada waktu itu muncul lima besar partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSII. Dengan dasar itu, PKI juga merasa punya hak untuk menempatkan wakilnya dalam Panitia Pemeriksaan. Setelah menerima surat protes dari Central Comite PKI, pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 317 tanggal 21 Desember 1955 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan. Dalam Keputusan Presiden tersebut anggota panitia ditambah menjadi dua



Sumber: ANRI, Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum 1949 – 2005 Nomor 5434 Keputusan Presiden RI Nomor 188 tentang Pengangkatan PPI tanggal 7 November 1953



Pernyataan protes keras Pengurus Besar Partai Adat Rakyat Bukittinggi tanggal 26 Maret 1954 terhadap susunan PP Provinsi Sumatera Tengah yang telah terbentuk Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950 – 1959 Nomor 963



Surat CC PKI kepada Perdana Menteri RI mengenai protes PKI tentang susunan Panitia Pemeriksaan yang tidak mengikutsertakan PKI

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950 – 1959 Nomor 933

orang, yaitu Ir. Sakirman (PKI) dan Siauw Giok Tjhan (Baperki).

Pemeriksaan terhadap berkas administrasi calon anggota legislatif

dilakukan secara bertahap. Hal ini disebabkan karena jumlah anggota DPR berjumlah 260 orang (257 dipilih dan 3 diangkat) dan anggota Konstituante berjumlah 520 orang (514 dipilih dan 6 diangkat) ditambah 14 orang wakil golongan minoritas. Dengan demikian, Panitia Pemeriksaan melakukan puluhan kali sidang untuk mengesahkan status calon anggota legislatif.

Lepas dari segala kekurangannya, secara umum PPI telah berhasil menyelenggarakan Pemilu 1955 dengan baik. Perlu diketahui Pemilu 1955 merupakan eksperimen politik besar di tengah masyarakat yang 75% masih buta huruf. Selain itu, wilayah Indonesia demikian luas dan di beberapa daerah masih terjadi gangguan keamanan. Keberhasilan itu suatu hal yang luar biasa dan diapresiasi oleh dunia internasional.

(Oleh : Mudanto Pamungkas)

PARNO

DIGITALISASI ARSIP PAMFLET DAN POSTER KEMENTERIAN PENERANGAN 1942 - 1949 DI ANRI

Pamflet dan poster merupakan salah satu khazanah arsip statis yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pamflet dan poster juga menjadi media informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan baik dalam rangka memengaruhi, membentuk opini publik maupun propaganda politik. Menurut David Roberts dalam *Managing Records in Special Format* (1993), pamflet dan poster pada bidang kearsipan, perpustakaan dan kemuseuman dikategorikan sebagai Ephemera karena umumnya bersifat tercetak dan hanya digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian informasi arsip serta kemudahan akses pengguna, khazanah arsip pamflet dan poster merupakan salah satu jenis arsip yang dipreservasi melalui kegiatan digitalisasi. Adapun khazanah arsip pamflet dan poster yang didigitalisasi

adalah arsip pamflet dan poster Kementerian Penerangan tahun 1942-1949. Daftar arsip pamflet dan poster tersebut telah tersedia di Ruang Baca ANRI. Daftar arsip tersebut merupakan hasil pengolahan arsip pada Tahun 2015.

Terdapat lima tahapan kegiatan digitalisasi arsip pamflet dan poster yang dilakukan dalam rangka preservasi preventif ini yaitu: pertama, identifikasi arsip Pamflet dan Poster yang akan didigitalisasi. Identifikasi arsip dilakukan setelah diterbitkannya Surat Perintah untuk melakukan kegiatan digitalisasi. Identifikasi dimulai dari melakukan pengecekan terhadap *finding aids* baik inventaris maupun daftar arsip kemudian dilanjutkan dengan pengecekan secara fisik. Berdasarkan *finding aids* yang tersedia, arsip pamflet maupun poster hanya memiliki satu buah daftar yaitu Daftar Arsip Pamflet dan Poster Kementerian Penerangan (Kempen)

1942-1949. Pada daftar tersebut diketahui bahwa terdapat 308 lembar arsip yang disimpan yang di antaranya terdapat beberapa buah arsip berupa duplikasinya. Dengan demikian maka hanya terdapat 245 nomor arsip secara keseluruhan sebagaimana tertera pada daftar.

Identifikasi selanjutnya yaitu pengecekan secara fisik arsip untuk memastikan kesesuaian informasi pada daftar dengan arsip yang akan didigitalisasi serta pengecekan kondisi dari fisik arsipnya. Kondisi fisik yang diidentifikasi meliputi kondisi arsip berdasarkan tingkat kerusakan (baik, sobek atau bergelombang) serta ukuran dari fisik arsipnya (A5, F4, A4, A1, A2, A3, A4, A0, dan sebagainya). Hal tersebut dilakukan dalam rangka menentukan teknis pemindaian yang sesuai dengan kondisi peralatan digitalisasi yang dimiliki. Dari tahapan identifikasi ini diperoleh hasil bahwa terdapat 228 arsip bisa dipindai

PRESERVASI



Identifikasi arsip pamflet dan poster yang akan didigitalisasi

dengan menggunakan *overhead scanner* sedangkan 17 arsip harus dipindai menggunakan roll scanner (biasa digunakan untuk arsip peta).

Perbedaan perlakuan pemindaian ini disebabkan karena ukuran fisik arsip yang tidak sesuai dengan peralatan yang dimiliki serta kondisi arsip yang sudah bergelombang. Ukuran fisik yang dimaksud adalah ukuran fisik arsip tersebut berbeda dengan ukuran kertas arsip saat ini. Sebagai contoh, terdapat 17 arsip yang harus dipindai dengan *scanner* berbeda karena ukuran panjangnya melebihi A0, tetapi lebarnya kurang dari A0 maupun sebaliknya. Dengan kondisi tersebut, maka *overhead scanner* yang dimiliki (*Zeutschel Scanner A0*) tidak dapat digunakan untuk memindai arsip tersebut secara utuh, sehingga diperlukan alternatif pemindaian dengan peralatan yang



Pengecekan secara fisik arsip untuk memastikan kesesuaian informasi pada daftar dengan arsip yang akan didigitalisasi serta pengecekan kondisi dari fisik arsipnya.

sesuai. Pada proses penentuan ini pun selain ukuran yang diidentifikasi, kondisi permukaan arsip perlu menjadi perhatian, misalnya beberapa bagian dari arsip ditemukan sobek dan bergelombang. Selain hal tersebut, pada tahap identifikasi ini harus melihat sisi informasi perekaman arsip apakah hanya satu sisi atau informasi penulisannya bolak-balik. Data hasil identifikasi ini kemudian dilaporkan

sebagai hasil kegiatan identifikasi arsip yang akan didigitalisasi.

Kedua, pemindaian/*scanning* arsip. Data hasil identifikasi yang telah dilakukan menjadi masukan bagi pelaksanaan pemindaian. Seperti proses pemindaian pada umumnya, sebelum dilakukan pemindaian baik pada *overhead scanner* maupun *roll scanner* harus dilakukan pengaturan

mesin sesuai standar yang telah ditetapkan. Standar pemindaian arsip pamflet dan poster ini mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) ANRI Nomor 100 Tahun 2015 tentang SOP Alihmedia Arsip Kartografik dan Kearsitekturan ke Digital dan SOP ANRI Nomor 101 Tahun 2015 tentang Alihmedia Arsip Konvensional ke Digital. Salah satu pengaturan pemindaian yang dilakukan di antaranya adalah image yang ditentukan diatur dengan dua keluaran format, yaitu berupa format TIFF dengan resolusi 400 dpi untuk kebutuhan preservasi serta format JPEG dengan resolusi 300 dpi untuk kebutuhan akses. Selain itu metadata lainnya pun diatur sebelum proses pemindaian dimulai, yang meliputi jenis arsip, penamaan *file digital*, pelaksana, kompresi dan sebagainya.

Ketiga, penilaian hasil (*Quality Control*) terhadap hasil pemindaian. Penilaian hasil pemindaian dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil digitalisasi. Pada kegiatan ini penilaian dilakukan terhadap kesesuaian antara gambar arsip dengan image digital yang dihasilkan, kesesuaian metadata (resolusi, jenis *file*, pelaksana, dan lainnya), posisi *image* (ada tidaknya *image* yang terpotong, posisi *image*-nya apakah vertikal, horizontal maupun kemiringannya), serta kesesuaian tampilan warna *image* yang dihasilkan (terlalu gelap, terang dan lainnya). *Image* digital yang tidak sesuai dengan standar *quality control* yang telah disepakati, dikembalikan untuk dipindai ulang. Setelah proses penilaian hasil digitalisasi tersebut selesai, maka pelaksana digitalisasi membuat berita acara pemindaian arsip pamflet dan poster Kementerian Penerangan (Kempen) Tahun 1942-1949 yang di tanda tangani oleh



Pemindaian/scanning arsip



Penilaian hasil (*Quality Control*) terhadap hasil pemindaian

Kepala Subdirektorat Reproduksi dan Digitalisasi Arsip.

Keempat, penyusunan daftar hasil digitalisasi. Tahapan ini dilakukan setelah penilaian hasil pemindaian selesai. Penyusunan daftar arsip hasil digitalisasi mengacu pada daftar arsip yang telah dikeluarkan Direktorat Pengolahan yaitu Daftar Arsip Pamflet dan Poster Kempen Tahun 1942-1949. Tetapi, pada daftar arsip hasil alihmedia digitalisasi, terdapat penambahan berupa nama *file image digital*, ukuran *image* dan serta *image*-nya itu sendiri. Daftar ini kemudian

disahkan Direktur Preservasi sebagai daftar arsip hasil digitalisasi.

Kelima, penyimpanan arsip hasil *digital* dan *backup*. Penyimpanan arsip hasil *digital* dilakukan setelah daftar arsip disahkan. Arsip *digital* disimpan pada penyimpanan *digital* (*server storage*) berdasarkan ketentuan pengaturan yang telah ditetapkan. Sementara itu image hasil digitalnya disimpan juga dalam bentuk *portable optical disc* sebagai *backup file* dan untuk kemudahan akses pengguna. Dengan demikian maka diharapkan *image digital* dari proses digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan akses pengguna sehingga dapat mengurangi sentuhan langsung terhadap fisik arsipnya.

J.B. SUMARLIN: EKONOM SEDERHANA YANG SELALU TAMPIL MEMBUAT GEBRAKAN

Pada tanggal 6 Februari 2019, Tim Wawancara Sejarah Lisan ANRI berkesempatan melakukan wawancara dengan Prof. Dr. J.B. Sumarlin di Apartemen Essence Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Johannes Babtista Sumarlin terlahir dengan nama Katubin. Ia dilahirkan di desa Ngadirejo, Kecamatan Nglegok, Blitar pada tanggal 7 Desember 1932. Nama Katubin sendiri diberikan oleh kakeknya mengandung tiga kat singkatan akhad (Minggu), tu artinya metu (lahir), bin artinya sabin (sawah). Jadi jika dirangkai pengertiannya Katubin adalah anak yang lahir pada hari Minggu di sawah. Karena pada saat anak-anak sering sakit-sakitan maka oleh kakeknya namanya diubah menjadi Sumarlin, karena kakak lakinya bernama Sumarlan. Meski terlahir dari keluarga petani sederhana, namun Sumarlin memiliki semangat belajar yang tinggi. Agar bisa tetap melanjutkan sekolahnya maka sejak usia 12 tahun Sumarlin ngenger kepada pamannya di Yogyakarta.

Sebagai remaja yang tumbuh di era Perang Kemerdekaan, Sumarlin juga turut berjuang. Ia pertama kali bergabung dengan Palang Merah Indonesia (PMI) kemudian bergabung dengan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) di Yogyakarta. Selama menjadi anggota TRIP, Sumarlin terlibat dalam pertempuran melawan Belanda termasuk Serangan Umum 1

Maret 1949 di Yogyakarta. Oleh karena itu, ia memperoleh penghargaan Bintang Gerilya dari pemerintah.

Setelah Perang Kemerdekaan usai, Sumarlin melanjutkan SMA di Jakarta mengikuti pamannya yang pindah tugas di Jakarta. Setelah lulus SMA, ia mengambil kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama berada di Jakarta, Sumarlin kuliah sambil bekerja. Meskipun demikian nilai akademiknya tetap bagus dan dipercaya sebagai asisten dosen. Karena nilainya bagus, oleh Prof. Sumitro

Djojohadikusumo ia diberi rekomendasi untuk melanjutkan studi S2 di University of California Berkeley. Ia berangkat ke Amerika Serikat bersama dengan Ali Wardhana. Setelah memperoleh gelar M.A., Sumarlin kembali mengajar di almaternya. Pada tahun 1968, Sumarlin telah memperoleh gelar Ph.D dari University of Pittsburgh. Ia memperoleh gelar tersebut setelah berhasil mempertahankan disertasi berjudul *Some Aspects of Stabilization Policies and Their Institutional Problems: The Indonesian Case 1950-1960*.

Setelah kembali ke tanah air, Sumarlin diangkat sebagai staf ahli



Prof. Dr. J.B. Sumarlin



Tim Wawancara Sejarah Lisan ANRI berkesempatan melakukan wawancara dengan Prof. Dr. J.B. Sumarlin

oleh Menteri Keuangan Ali Wardhana. Jabatan tersebut hanya enam bulan diembannya, ia kemudian ditarik oleh dosennya sewaktu di Universitas Indonesia, Prof. Widjojo Nitisastro, untuk mengisi jabatan Deputy Fiskal dan Moneter di Bappenas (1969 – 1973). Selain itu, Sumarlin juga merangkap sebagai Sekretaris Dewan Moneter (1970 – 1973). Ia kemudian dipercaya menjadi Wakil Ketua Bappenas (1973 – 1982). Pada saat yang sama Sumarlin juga merangkap sebagai Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (1973 – 1983). Dengan jabatan ini Sumarlin menjadi Ketua Operasi Penertiban (Opstib). Saat menjadi Ketua Opstib Sumarlin pernah melakukan tangkap tangan terhadap oknum pegawai Kementerian Keuangan yang melakukan pungutan liar terhadap pegawai rumah sakit. Tindakan itu merupakan shock therapy untuk para oknum aparat pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya. Pada tahun 1983, Sumarlin dipercaya sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional merangkap Ketua Bappenas. Sebagai Ketua Bappenas, ia turun ke lapangan memantau sawah-sawah yang terserang hama wereng di beberapa provinsi. Hasil pemantauannya itu kemudian dilaporkan kepada Presiden Soeharto untuk dicarikan solusinya. Jabatan tersebut diembannya hingga tahun 1988. Meski berlatar belakang ilmu ekonomi, namun Sumarlin pernah dua kali menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ad interim menggantikan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro dan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto yang meninggal dunia. Dalam kurun waktu 1972 – 1988 Sumarlin juga menjabat sebagai anggota MPR dan menjadi tim perumus Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Setelah bertahun-tahun malang melintang di bidang perencanaan pembangunan, fiskal, dan moneter akhirnya Sumarlin diangkat sebagai Menteri Keuangan (1988 – 1993). Namun sebelumnya pada tahun 1987, Sumarlin pernah menduduki jabatan tersebut secara ad interim. Pada

saat itu ia mengeluarkan kebijakan pengetatan moneter dengan cara menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Hal ini dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia untuk mengatasi perekonomian Indonesia yang menghadapi kesulitan. Kebijakan tersebut berhasil dengan baik, hal itu ditunjukkan oleh angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,7% melebihi target rata-rata pertumbuhan 5% (1988). Publik mengenal kebijakan tersebut sebagai Gebrakan Sumarlin I. Apresiasi atas keberhasilan kebijakan tersebut bukan hanya datang dari dalam negeri, majalah ekonomi ternama Euromoney menobatkan Sumarlin sebagai Finance Minister of the Year (1989) pada acara Annual Meetings of World Bank-IMF. Pada bulan Maret 1991, muncul Gebrakan Sumarlin II. Kebijakan tersebut dalam rangka mendukung pengendalian inflasi yang muncul akibat dari dikeluarkannya Paket Oktober 1988, Paket Maret 1989, dan Paket Januari 1990. Gebrakan Sumarlin jilid II ini mampu mengekang laju inflasi hingga secara berangsur-angsur turun menjadi 4,9% pada 1992.

Meski dikenal sebagai penganut Katolik yang taat, namun Sumarlin turut membidani lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya bank syariah dengan prinsip bagi hasil di Indonesia. Karena dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi maka tidak salah jika Sumarlin ditunjuk sebagai Ketua BPK. Jabatan Ketua BPK (1993 – 1998) merupakan jabatan terakhir J.B. Sumarlin dalam pemerintahan. (MP)

Dharwis W.U. Yacob

CODING DA VINCI: KOLABORASI KERJA KREATIF ARSIPARIS DI JERMAN

Pada tahun 2014, Coding Da Vinci diadakan pertama kali di Jerman tepatnya di Berlin. Coding Da Vinci awalnya merupakan pertemuan para peretas di Jerman yang diselenggarakan atas kerjasama dari Yayasan Kebudayaan Federal Jerman, Perpustakaan Digital Jerman, Pusat Penelitian dan Kompetensi Digitalisasi Berlin (digiS), Yayasan Pengetahuan Terbuka Jerman dan Wikimedia Jerman. Deutsche Digitale Bibliothek atau Perpustakaan Digital Jerman memiliki fungsi untuk mengurus kepemilikan digital institusi budaya dan ilmiah agar dapat diakses secara mudah. Lembaga ini menawarkan akses gratis ke karya seni digital, buku, musik, monumen, film, dokumen, dan data budaya dan sains Jerman melalui Internet. Deutsche Digitale Bibliothek bertindak sebagai jaringan yang menghubungkan dan menyajikan tawaran digital dari para mitranya untuk berkontribusi kepada ilmu pengetahuan. Yayasan Pengetahuan Terbuka Jerman atau *Open Knowledge Foundation Germany* adalah organisasi nirlaba yang telah berkomitmen untuk menyebarkan pengetahuan yang bebas dan dapat diakses secara terbuka di masyarakat yang didirikan pada tahun 2011. Yayasan Pengetahuan Terbuka Jerman adalah menciptakan infrastruktur digital untuk masyarakat sipil dan membantu



Logo Coding Da Vinci Tahun 2019 di Munich, Jerman



Coding Da Vinci, kegiatan kolaborasi arsiparis dengan bidang ilmu lainnya

warga negara, jurnalis, dan organisasi non-pemerintah untuk menggunakan haknya atas informasi. Digitalisasi Pusat Penelitian dan Kompetensi Berlin (digiS) merupakan jaringan yang memiliki tugas mengoordinasikan

proyek-proyek digitalisasi di lembaga warisan budaya di Berlin, didukung oleh pengembangan layanan untuk ketersediaan jangka panjang informasi digital. Wikimedia Jerman



Kegiatan diskusi antara para peserta Coding Da Vinci dari Program Internasional



Games online yang menggunakan arsip sebagai sumber data

bahwa lembaga yang memberikan pengetahuan gratis kepada masyarakat. Wikimedia Jerman ingin memberikan pembelajaran kolaboratif dengan konten yang dapat digunakan secara bebas di ruang kelas maupun ruang kuliah. Wikimedia Jerman mengajak para arsiparis, peneliti, dan lembaga budaya lainnya untuk menulis konten. Wikimedia Jerman juga menyusun kerangka hukum yang aman agar proyek-proyek seperti Wikipedia dapat dikembangkan di masa depan.

Coding Da Vinci rutin diadakan setahun sekali dan tempatnya bergantian di Jerman. Pada tahun 2019, Coding Da Vinci diadakan di Munich. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan dua dunia antara

bidang GLAM dan IT (Information Technology) termasuk komunitas peretas dan desainer IT untuk mengembangkan ide dan prototipe untuk sektor budaya. Coding Da Vinci menawarkan kegiatan jangka waktu pendek untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak. Kegiatan ini selalu diawali dengan presentasi dari bidang GLAM untuk mengembangkan ide proyek dan membentuk tim untuk realisasinya. Lembaga dari Bidang GLAM memberikan data konten terbuka kemudian ditawarkan kepada para peretas dan desainer IT untuk mengembangkan program serta aplikasi.

Untuk peserta internasional menggunakan program berbeda yang berbeda. Setiap awal tahun,

di dalam laman www.goethe.de, terdapat undangan partisipasi dalam kegiatan Coding Da Vinci yang memberi kesempatan kepada pakar bidang GLAM (*Gallery/galeri, Library/perpustakaan, Archives/arsip, Museum/museum*) untuk mengikuti kegiatan ini termasuk para peretas dan desainer IT. Setelah itu, diumumkan daftar nama yang terpilih dari seluruh dunia yang mendaftar untuk menjadi peserta kegiatan Coding Da Vinci. Untuk tahun 2019 terpilih peserta dari Indonesia, Brazil, Afrika Selatan, Senegal, Tanzania, dan Pantai Gading dengan perincian profesi dari arsiparis, pustakawan, programer, kurator, dan composer. Untuk profesi arsiparis terpilih Dharwis Widya Utama Yacob dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

Untuk para peserta internasional yang ikut dalam Coding Da Vinci Tahun 2019 ditambahkan kunjungan ke beberapa tempat menarik dari tanggal 2 April 2019 sampai dengan 5 April 2019 yaitu ke Werk 1 yang merupakan sebuah tempat pengembangan game online yang berdasarkan data arsip yaitu Game Bavaria, kunjungan ke Museum Bayern serta mendapatkan pengetahuan mengenai Digital Museum, kunjungan ke Museum Funf Kontinente (Museum Lima Benua) yang memperlihatkan khazanah museum dari berbagai negara dengan diakhiri dengan diskusi dengan kurator museum tersebut, Kunjungan ke Bavarian State Library dengan presentasi mengenai khazanah digital serta tur untuk melihat khazanah yang ada di museum tersebut, Kunjungan ke Academy of Sciences and Humanities Munchen untuk memperlihatkan hasil kerja mereka selama ini, kunjungan ke Wikipedia edit-a-thon dan kunjungan ke Lenbachhaus und Kunstbau Munchen untuk berdiskusi mengenai khazanah On-line.



Para peserta Coding da Vinci sedang mengembangkan ide-ide kreatif

Coding Da Vinci pada tahun 2019 diselenggarakan di Munich. Coding Da Vinci tahun 2019 menggabungkan 30 lembaga-lembaga budaya di Wilayah Bavaria dan Baden-Württemberg antara lain seperti Arolsen Archives und KZ-Gedenkstätte Dachau (Arsip Kamp Konsentrasi Dachau), Deutches Spielearchiv Nurnberg (Arsip mengenai permainan di Jerman), Stadarchiv Stuttgart (Arsip Kota Stuttgart), Landearchiv Baden-Wuttenberg (Arsip Kota Baden-Wuttendberg), Museum Zeppelin (Museum Kapal Zeppelin), Zoologische Samlung (Koleksi Zoologi), dan bersama-sama merancang kembali akses ke warisan budaya digital dengan aplikasi, situs web, implementasi VR (Virtual Reality)/AR (Augmented Reality), instalasi interaktif, dan visualisasi data. Lembaga budaya tersebut menyediakan data terbuka yang diterbitkan mulai 4 Maret 2019. Sejak Coding Da Vinci didirikan pada tahun 2014, lebih dari 60 lembaga budaya dari Jerman dan Eropa telah berpartisipasi dalam Coding Da Vinci sebagai penyedia data. Penyedia data ini secara permanen menyediakan gambar, suara, objek 3D, video, dan metadata-nya sendiri di bawah

lisensi terbuka untuk penggunaan tanpa batasan. Coding Da Vinci telah menciptakan 54 proyek kreatif sampai tahun 2018.

Pada tanggal 6-7 April 2019, Coding Da Vinci dilaksanakan di Perpustakaan Kota Munich dengan alamat Gasteig Nomor 31. Seperti tradisi sebelumnya, penyedia data mempresentasikan catatan data terbuka mereka kepada lebih dari 180 pihak yang berkepentingan. Peretas dan penggemar budaya yang berpartisipasi datang bersama sebagai tim untuk bersama-sama mengembangkan aplikasi, permainan, dan visualisasi berdasarkan kumpulan data. Acara dibuka oleh Anton Biebl, yang ditunjuk sebagai Pejabat Kebudayaan Kota Munich dilanjutkan oleh Hortensia Völckers, Direktur Artistik Yayasan Kebudayaan Federal Jerman (KSB) yang memuji kegiatan Coding Da Vinci sebagai format kerja yang fantastis. Para peserta mengembangkan 30 ide-ide kreatif untuk aplikasi dan permainan baru berdasarkan data budaya terbuka dan dipresentasikan secara terbuka pula. Beberapa contohnya antara lain adalah tim yang mendedikasikan dirinya untuk dataset dari Stadtmuseum Landsberg

am Lech yaitu berisi ilustrasi panel sejarah yang menggambarkan adegan kematian seorang misionaris. Tim ini bekerja di bawah judul “162 cara untuk mati” dengan menggunakan Toniebox yang merupakan perangkat untuk memutar radio. Tim Memento Me-Mori mendesain permainan memo berdasarkan data dari Koleksi Zoologi Perpustakaan Universitas FAU Erlangen-Nürnberg dengan permainan setiap gambar binatang hidup harus ditugaskan untuk menggambar kerangkanya. Selain itu, Tim Musel yang merupakan akronim dari kata Museum dan Hotel yang beranggotakan Dharwis Widya Utama Yacob dari Indonesia, Kofi Sika Latzoo dari Senegal, Emmanuel Thomas Malongoe dari Tanzania, dan Kouassi Junior Atreman dari Pantai Gading memberikan konsep aplikasi dengan menggunakan kartu hotel dapat digunakan sebagai tiket masuk museum di Jerman.

Coding Da Vinci merupakan kegiatan kolaborasi kreatif yang perlu di contoh oleh Indonesia. Penggunaan arsip dalam Coding Da Vinci tidak hanya sebagai sumber penelitian melainkan untuk pengembangan teknologi yang lebih baik. Arsip dalam Coding Da Vinci digunakan sebagai data dalam pengembangan aplikasi, game online, dan bentuk ide kreatif lainnya. Arsip dalam Coding Da Vinci tidak hanya sebagai sumber sejarah melainkan sumber data terbaru untuk digunakan sebagai bagian dari teknologi baru. Coding Da Vinci perlu dilakukan di Indonesia agar masyarakat lebih mengenal arsip sebagai bagian dari perkembangan teknologi.

ARSIP EMAS: TEROBOSAN ARPUSDA JATENG DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Arsip kuwi, ora disenengi nalika kondisine seneng. Tapi, disenengi nalika susah. Saya mengajak masyarakat peduli dengan arsip pribadinya masing-masing. Apalagi, sekarang sudah ada aplikasinya,” Ganjar Pranowo saat memberikan sambutan pada acara peluncuran Aplikasi Arsip Elektronik Masyarakat (Arsip EMAS) Jateng di Hotel Alana Surakarta, Selasa (5/3/2019) sore.

Saat ini dunia sedang dilanda tren revolusi industri 4.0 yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Hal tersebut mencakup sistem *cyber-fisik*, *internet of things* (IoT), komputasi awan, dan komputasi kognitif. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk kearsipan. Salah satu tren yang dikembangkan oleh lembaga kearsipan saat ini adalah melalui *playstore*. sebuah layanan konten digital milik perusahaan Google yang telah dikembangkan melingkupi toko daring untuk produk-produk seperti musik atau lagu, buku, aplikasi, permainan, ataupun pemutar media berbasis awan. Layanan Google Play Store ini diperkenalkan pada bulan Maret 2012 sebagai pengganti dari Android Market dan Layanan Musik Google.

Dari berbagai aplikasi yang bertebaran di playstore, ada beberapa yang dikembangkan oleh lembaga kearsipan, di luar negeri seperti aplikasi milik Arsip Nasional Amerika Serikat, Arsip Nasional Inggris, Arsip Nasional Rumania hingga Arsip Nasional Uni Emirat Arab. Sedangkan di dalam negeri sebelumnya pernah muncul aplikasi yang dikembangkan Kantor Arsip Daerah Salatiga dengan menampilkan foto-foto Salatiga Tempo Doeloe yang bersumber dari arsip. Kemudian Sistem Pengelolaan Arsip Surat Internal (SEPASI) yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Tuban), Arsip Kabupaten Bantul, DPRD Loteng *Digital Archive* hingga Arsip EMAS.

Mungkin yang terakhir ini agak unik. Arsip EMAS (Arsip Elektronik Masyarakat) adalah aplikasi penyimpanan arsip-arsip keluarga yang dikembangkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Arpusda Jateng). Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan penyimpanan arsip keluarga seperti : KTP, Kartu Keluarga, Akta

Kelahiran, Ijazah, dan sebagainya.

Aplikasi Arsip Elektronik Masyarakat (Arsip EMAS) ini secara resmi diluncurkan pada 5 Maret 2019 di Solo, Jawa Tengah dengan harapan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya penyimpanan dan pemeliharaan arsip secara mandiri sehingga informasi arsip tersebut masih bisa terselamatkan apabila terjadi bencana alam seperti banjir, kebakaran, gunung meletus dan sebagainya.





Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah sedang menekan sirene dalam peresmian Arsip EMAS di Surakarta Maret 2019 (Koleksi Humas Provinsi Jateng)

Seperti dilansir oleh Arpusda Jateng bahwa aplikasi ini Merujuk pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) sebagai upaya untuk peningkatan kesadaran lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsip serta pendanaan kearsipan. Untuk mencapai tataran yang lebih tinggi dari tujuan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip perlu dikembangkan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan dan perawatan arsip yang dimulai dari level terbawah di masyarakat, yaitu lingkungan keluarga. Apabila dari tingkat keluarga telah sadar akan pentingnya arsip diharapkan GNSTA masyarakat di



Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang mencoba aplikasi Arsip EMAS di gadgetnya, Surakarta Maret 2019 (Koleksi Humas Provinsi Jateng)

Jawa Tengah dapat segera terwujud.

Sedangkan untuk masalah keamanan, menurut Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Prijo Anggoro Budi Raharjo menjelaskan, aplikasi Arsip EMAS tersebut dibuat

menyesuaikan dengan teknologi informasi yang berkembang seiring dengan dinamika yang ada. Arsip-arsip itu terkoneksi dengan Dinas Arpus, namun kerahasiaan dijaga ketat. Untuk ke depannya, ia berharap pemerintah kabupaten/kota dapat ikut membuat jejaring Arsip EMAS. Sehingga konektivitasnya bisa lebih luas. (SA/ diolah dari berbagai sumber)

Sumber:

<https://jatengprov.go.id/publik/arsip-emas-simpan-arsip-online-yang-mudah-dan-aman/>

<http://www.arpusda.jatengprov.go.id/home/berita/launching-aplikasi-arsip-emas#>

Lufi Herawan

INDUSTRI 4.0: PENGGUNAAN DATA BESAR DALAM BIDANG KEARSIPAN

Pada 2011 Indonesia telah memasuki era industri 4.0. Saat ini Indonesia sudah memiliki *Roadmap* (peta jalan) implementasi industri 4.0, yang telah disampaikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Oleh sebab itu, Indonesia khususnya sektor industri perlu banyak melakukan pembenahan terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing di era industri 4.0. Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat untuk mendukung hal tersebut. Dalam konsep industri 4.0 terdapat empat prinsip rancangan, diantaranya :

- *Interconnection* (interoperabilitas), Kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan satu sama lain melalui *Internet of Thing* (IoT).

- *Information transparency* (transparansi informasi), melalui transparansi informasi, sejumlah besar informasi dapat dipergunakan untuk membuat keputusan yang tepat.

- *Technical Assistance* (bantuan teknis), mampu melakukan tugas-tugas yang berulang-ulang, tidak menyenangkan, melelahkan, dan tidak aman. Selanjutnya *assistance*

systems mampu mengumpulkan dan memvisualisasikan informasi yang lengkap untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah penting dengan cepat.

- *Decentralized decisions* (keputusan mandiri), mampu membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin.

Berdasarkan keempat prinsip rancangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari implementasi industri 4.0 tersebut adalah penggunaan teknologi informasi untuk membantu mengumpulkan informasi yang lengkap untuk melakukan pengambilan keputusan secara tepat dan dalam waktu yang cepat secara mandiri berdasarkan informasi yang ada untuk memecahkan permasalahan. Industri 4.0 merupakan era digital ketika semua mesin terhubung dengan internet melalui berbagai teknologi yang berkembang saat ini.

Tren perkembangan teknologi saat ini diantaranya adalah data besar (*Big Data*). Bahkan terdapat artikel yang menyatakan bahwa data besar merupakan salah satu pilar fungsional Industri 4.0 selain *Internet of Thing* (IoT), *Internet of Services* dan *Cyber Security*. Data besar dapat dipergunakan untuk efisiensi

pekerjaan (waktu, biaya, sumber daya manusia), akurasi, prediksi, serta sistem rekomendasi. Perkembangan teknologi informasi tersebut mengarah kepada analisis data, untuk dapat digali sehingga hasil analisis dapat bermanfaat untuk organisasi. Belum ada satu definisi tentang data besar itu sendiri, tetapi menurut Manyika dkk (2011), data besar adalah sebagai kumpulan data yang ukurannya terlalu besar, terlalu kompleks untuk perangkat lunak data biasa yang menggunakan kemampuan mereka untuk analisis atau manajemen, dll. Menurut Hashem dkk (2015), data besar didefinisikan sebagai sejumlah besar data, sangat cepat dalam pemrosesan dari berbagai bentuk untuk mendukung pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Davis (2013), data besar adalah volume besar data terstruktur dan tidak terstruktur yang dikumpulkan dan dianalisis melalui metode baru yang dapat menghasilkan nilai bagi organisasi. Dari pengertian di atas data besar dapat disimpulkan: kumpulan data yang ukurannya terlalu besar, terlalu kompleks, sangat cepat dalam pemrosesan dari berbagai bentuk data baik terstruktur maupun tidak terstruktur untuk pengambilan keputusan. Gartner dan banyak perusahaan lainnya, termasuk IBM

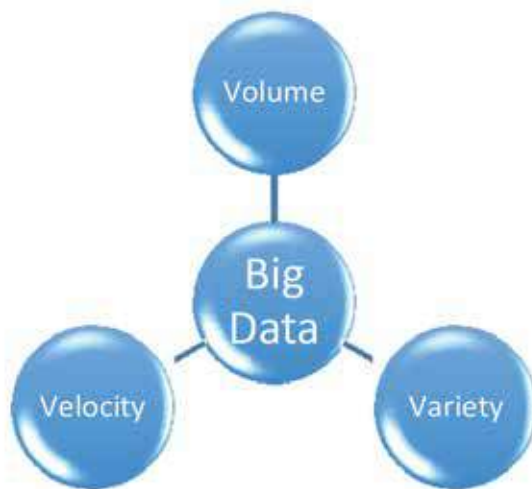
dan Microsoft masih menggunakan model 3V untuk menggambarkan data besar. Dalam Model 3V, *volume* berarti pengumpulan data skala besar menjadi semakin besar. Kecepatan (*velocity*) mengacu pada ketepatan waktu data besar, khususnya pengumpulan data dan analisis pengolahan, harus cepat dan tepat waktu dilakukan untuk mendapatkan nilai maksimal. *Variety* berarti banyak jenis data termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur seperti data audio, video, teks, dan data terstruktur tradisional (CRM, ERP, SCM), Model 3V dapat dilihat pada Gambar 1.

Ada banyak manfaat penggunaan data yang besar. Pertama, sebuah organisasi menghasilkan informasi yang lebih akurat karena data yang besar dapat menemukan nilai, koneksi, tren, dan pola. Kedua, meningkatkan proses pengambilan keputusan karena lebih kaya dalam hal pengumpulan data. Ketiga, data besar bisa mengurangi biaya perawatan. Jenis peralatan tertentu kemungkinan akan rusak setelah bertahun-tahun, jadi harganya mahal untuk mengganti, bahkan *file* penting atau dokumen dapat tertinggal di

dalamnya. Keempat, ini meningkatkan layanan pelanggan karena sebuah organisasi dapat memahami preferensi pelanggan. Sebelum ditemukan konsep data besar untuk analisis data, terdapat beberapa konsep atau aplikasi untuk melakukan analisis data untuk pengambilan keputusan. Tabel 1 menunjukkan konsep atau aplikasi analisis data yang digunakan selama 45 tahun terakhir.

Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat, dimana penggunaannya tidak hanya sebatas sektor industri tetapi juga sektor-sektor lain termasuk pemerintah. Dewasa ini pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* telah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan saat ini dipertajam kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada pelaksanaan *e-government*,

setiap instansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi untuk dilakukan pengolahan maupun analisis, termasuk pelaksanaan *e-government* dalam bidang penyelenggaraan kearsipan di Indonesia, dimana salah satu tujuan dari penyelenggaraan kearsipan adalah menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam keidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyelamatan arsip statis dari lembaga negara, BUMN, ormas, orpol dan perseorangan dilakukan melalui kegiatan penyusutan arsip, salah satunya adalah penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Selain itu proses akuisisi juga akan menambah khazanah arsip statis yang ada, dimana arsip statis akan disimpan sebagai memori kolektif bangsa yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Setelah dilakukan akuisisi arsip, untuk dapat dilayankan kepada seluruh masyarakat selanjutnya arsip akan melalui proses pengolahan (*arrangement and description*), pelestarian (*conservation-preservation*), akses (*access*), dan pemanfaatan arsip. Selain hal di atas pemanfaatan media sosial juga meningkat dimana dalam survei penetrasi dan profil perilaku pengguna internet Indonesia yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2018 tercatat 24,7% dari total 171,17 juta jiwa pengguna internet menggunakan media sosial, dimana konten media sosial yang paling banyak dibuka adalah Facebook (50,7%), Instagram (17,8%), Youtube (15,1%), dan Twitter 1,7%. Media sosial juga dapat menjadi sumber data tidak terstruktur dari data besar, apalagi pengguna media sosial tidak hanya masyarakat tapi juga pejabat, tokoh maupun instansi pemerintah. Bahkan di Inggris akun twitter pemerintah sudah disimpan sebagai arsip.



Gambar 1

Nama	Periode	Penjelasan
Decision Support	1970 – 1985	Menganalisis beberapa data terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan.
Executive Support	1980 – 1990	Analisa data bagi para eksekutif senior untuk mengambil tindakan.
Online analytical processing (OLAP)	1990 – 2000	Aplikasi untuk menganalisa tabel data multimedimensional.
Business Intelligence	2005 – 2010	Aplikasi untuk mendukung keputusan berbasis data, dengan empasis pada pelaporan.
Analytic	2005 – 2010	Analisis pemodelan statistik dan matematis untuk keputusan.
Big Data	2010 – Saat ini	Analisis data terstruktur dan tidak terstruktur sangat besar, data bergerak cepat, dalam kurun waktu singkat.

Tabel 1
Sumber: Davenport (2013)

Lalu, bagaimana penggunaan data besar dalam kearsipan, dan apakah lembaga kearsipan sudah perlu menggunakan data besar untuk pengambilan keputusannya, mengingat teknologi ini membutuhkan biaya yang tidak kecil untuk implementasinya. Menurut Doudlas (2001), Untuk penggunaan data besar hendaknya memenuhi karakteristik dan model data besar, dimana model data besar adalah model 3V yang terdiri dari *Volume*, *Variety*, dan *Velocity* yang sudah dijelaskan diatas. Analisis model 3V penggunaan data besar adalah: *Volume*: data yang akan dilakukan analisis terdiri dari data atau arsip berupa teks, film, video, suara, foto dll. Dari jenis data yang ada semuanya merupakan data yang cukup besar dari segi volume. Apalagi data atau arsip harus dikumpulkan dari kurang lebih 940 simpul jaringan di seluruh Indonesia dan dari berbagai macam sistem informasi yang ada pada pencipta arsip. Selain itu data juga harus dikumpulkan dari sistem informasi kearsipan lainnya serta dari media sosial yang ada. *Variety*: data berupa arsip cukup bervariasi diantaranya terdiri dari teks, film, video, suara, foto dll. Terdapat data terstruktur yang berasal dari database dari sistem

informasi kearsipan tertentu. Selain itu juga terdapat data yang tidak terstruktur, yaitu data yang berasal dari sistem informasi kearsipan lainnya serta data yang berasal dari media sosial. *Velocity*: pengumpulan data atau arsip dan analisis pengolahan yang dilakukan secara cepat dan tepat waktu akan sangat penting dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh dalam hal ini sistem akan memberikan prediksi terhadap arsip apa saja yang harus dilakukan akuisisi, sehingga akan semakin banyak arsip yang akan terselamatkan setelah habis masa retensinya, dan resiko kerusakan media arsip lebih kecil karena waktu akuisisi yang lebih cepat, bahkan prediksi volume arsip yang akan diakuisisi pun telah diketahui. Berdasarkan analisis model data besar diatas lembaga kearsipan nasional memenuhi model data besar, sehingga penggunaan data besar dapat diterapkan dalam rangka pengambilan keputusan dengan tepat dan cepat. Pertimbangan lain selain model data besar juga perlu dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih menyeluruh. Analisis penggunaan data atau arsip dapat dilihat pada Tabel 2.

Penggunaan data besar

dalam kearsipan diantaranya dapat digunakan untuk prediksi, rekomendasi, efisiensi pekerjaan, dan akurasi, yaitu:

Prediksi: digunakan untuk melakukan prediksi terhadap arsip-arsip yang dapat dilakukan akuisisi. Prediksi juga dapat dilakukan terhadap jenis atau tema arsip apa saja yang perlu dilakukan akuisisi atau penyelamatan arsip. Prediksi dapat dilakukan terhadap semua instansi (lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan). Akuisisi dilakukan terhadap fisik arsip yang ada tidak hanya berupa hasil alih media yang berada pada sistem informasi, tetapi juga arsip dalam media kertas maupun media lainnya. Semakin cepat arsip diidentifikasi dan dilakukan verifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan atau lembaga kearsipan maka arsip akan lebih cepat terselamatkan, sehingga kemungkinan arsip hilang seperti surat 11 Maret (SUPERSEMAR) tidak akan terjadi. Selain itu dengan adanya prediksi tersebut petugas akan lebih mudah melakukan verifikasi sehingga pekerjaan akan lebih efektif

TEKNOLOGI

dan efisien. Dengan melakukan penyelamatan arsip diharapkan dapat menambah khazanah arsip yang dapat dilayankan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain prediksi arsip statis dapat juga digunakan untuk prediksi arsip terjaga sesuai dengan amanat undang-undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Arsip terjaga dalam Perka ANRI No 41 Tahun 2015 tentang pengelolaan arsip terjaga terdiri dari arsip kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan arsip masalah-masalah pemerintah yang strategis.

Rekomendasi dilakukan terhadap layanan arsip yang diberikan kepada masyarakat melalui ruang baca (menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis), pencarian mandiri melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (www.jikn.go.id) maupun melalui Sejarah Nusantara (sejarah-nusantara.anri.go.id). Dimana sifat arsip yang saling berkaitan antar tema sehingga dapat ditelusuri sesuai konten dan sesuai penggunaan arsip oleh pengguna-pengguna sebelumnya. Pengguna akan diberikan rekomendasi sesuai dengan ketertarikannya terhadap suatu tema arsip berdasarkan arsip yang diakses sebelum-sebelumnya oleh pengguna tersebut sehingga sesuai dengan arsip yang dibutuhkan. Atau pengguna dapat juga diberikan rekomendasi terhadap tema arsip yang sedang banyak dicari. Dengan sistem rekomendasi diharapkan pengguna banyak menemukan arsip dengan tema yang sesuai atau sesuai dengan arsip yang diperlukan. Dengan sistem rekomendasi yang tepat diharapkan juga dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor penggandaan arsip.

Efektifitas Pekerjaan dan Akurasi: penggunaan teknologi informasi secara

No	Sistem Informasi	Pengguna	Jenis Arsip & Data
1	SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis)	lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan	- Arsip Dinamis, Arsip Terjaga, Arsip Vital. - Teks, Image, Suara, Video.
2	SIKS (Sistem Informasi Kearsipan Statis)	Lembaga Kearsipan	- Arsip Statis. - Teks, Image, Suara, Video, Film.
3	SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional)	lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga kearsipan	- Arsip Statis, Arsip Dinamis, Arsip Terjaga, Arsip Vital. - Teks, Image, Suara, Video, Film.
4	Portal JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional) & Sejarah Nusantara	Lembaga Kearsipan tingkat Pusat	- Arsip Statis, Arsip Dinamis, Arsip Terjaga, Arsip Vital. - Teks, Image, Suara, Video, Film.
5	Sistem Informasi Kearsipan Lainnya: - EDMS (Elektronik Document Management System) - ERMS (Electronic Records Management System) - EDRMS (Elektronik Document Records Management System)	lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan	- Arsip Dinamis, Arsip Terjaga, Arsip Vital. - Teks, Image, Suara, Video.
6	Sosial Media (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll)	lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan (pejabat negara, tokoh dll)	- Arsip Dinamis, Arsip Pribadi - Teks, Image, Suara, Video, Film.

Tabel 2

umum bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan kehidupan manusia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Pada uraian diatas kita ketahui bahwa penggunaan data besar dapat menjadikan pekerjaan kita lebih efektif dengan adanya prediksi dan rekomendasi. Berdasarkan hasil prediksi maupun rekomendasi, waktu yang digunakan untuk mengelola arsip akan menjadi lebih cepat serta biaya pengelolaan arsip akan lebih murah, dan tentu saja kebutuhan sumber daya manusia akan lebih berkurang. Prediksi dan rekomendasi akan mengefektifkan pekerjaan kita apabila hasil yang diberikan adalah akurat, dimana akurasi hasil sangat tergantung pada data yang tersedia. Penggunaan data besar menggunakan data yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari baik yang berupa data terstruktur maupun data tidak terstruktur, baik menggunakan sistem kearsipan yang sudah ditentukan maupun media

sosial, sehingga analisis terhadap data yang ada akan akurat.

Dari pembahasan diatas dan dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, perlu didorong pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kearsipan sehingga mempermudah pengelolaan arsip dan juga pengambilan keputusan. Teknologi data besar secara analisis model 3V dapat digunakan untuk penyelenggaraan kearsipan, tetapi perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam dan mencakup semua aspek sebelum benar-benar diterapkan. Selain itu manfaat lain dari data besar dapat lebih digali kembali untuk dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara lebih optimal.



RAYI DARMAGARA

MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI ARSIP YANG AUTENTIK DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang secara filosofis bertujuan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian

penting bagi ketahanan nasional, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Berbanding terbalik dengan kondisi saat ini dengan maraknya berita bohong atau hoaks yang belakangan ini terjadi memberikan pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Sebut saja penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang baru saja berlangsung, banyaknya informasi pada media elektronik (sosial) yang tidak benar membuat kondisi masyarakat berada pada

situasi dengan opini yang terbelah, artinya ada sebagian orang yang menerima mentah-mentah informasi tersebut sehingga menjadi sebuah kebenaran, dan sebagian orang lagi masih perlu melakukan konfirmasi atas informasi tersebut serta sebagian yang lain lagi menganggap hal tersebut adalah informasi yang tidak benar. Jika ditelisik lebih jauh berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi 771 hoaks pada periode Agustus 2018 hingga Februari 2019, paling banyak berkaitan dengan isu politik. Kenapa hal ini terjadi? Mengutip pendapat seorang psikolog sosial politik asal amerika, Arie Kruglanski mengatakan bahwa kebutuhan publik untuk menerima hoaks didorong atas teori kebutuhan manusia atas informasi.

Publik butuh kepastian dan kecepatan informasi, ada kecenderungan sebagai fenomena saat ini adalah bahwa seseorang yang lebih dahulu mendapat informasi ingin cepat-cepat membagikannya karena ingin dianggap eksis dan menunjukkan eksistensinya. Padahal asupan informasi yang diperolehnya berasal dari media sosial masih diragukan kebenarannya.

Kebenaran dan ketidak benaran informasi yang simpang siur ini perlu diakhiri, sehingga penyelenggaraan negara yang baik dapat diwujudkan, artinya negara perlu hadir dalam memberikan informasi yang autentik dan terpercaya terhadap seluruh permasalahan yang ada. Negara harus memberikan informasi dengan basis data arsip yang autentik dan terpercaya dengan pemenuhan informasi pada waktu yang tepat.

Informasi yang berasal dari arsip yang autentik dan terpercaya dengan pemenuhan informasi pada waktu yang tepat ini tentu perlu ditunjang oleh manajemen pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan. Karenanya lembaga penyedia informasi publik yang merupakan lembaga pencipta yang wajib melakukan pengelolaan arsip. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur ketentuan tersebut dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 yang meliputi tahapan penciptaan arsip dan penggunaan arsip. Pada tahapan penciptaan arsip, tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip menjadi instrumen penting dalam

menjaga autentisitas arsip. Arsip yang tercipta tersebut dapat digunakan sebagai informasi atau diakses yang diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Dalam rangka ketersediaan arsip untuk kepentingan akses, arsip dinamis dapat dilakukan alih media. Hasil proses alih media inilah yang dapat dijadikan sebagai informasi autentik dan terpercaya yang disebarluaskan kepada publik sebagai jawaban atas kesimpangsiuran informasi yang tidak benar (hoaks).

Kepercayaan publik berasal pada informasi yang diterima apakah terkonfirmasi keautentikannya atau tidak. Sementara di sisi lain produksi hoaks dilakukan karena negara dan lembaga pemerintah acap kali abai memberikan informasi yang benar tersebut. Ruang kosong inilah yang dijadikan celah sehingga produksi hoaks semakin merajalela. Perlawanan terhadap hal tersebut dilakukan dengan peran serta lembaga publik dalam menyampaikan informasi dengan basis data arsip yang autentik. Ketika informasi ini efektif disampaikan, maka berita hoaks akan terlawan dan tergilas dengan sendirinya oleh informasi yang berasal dari arsip yang autentik.

Arsip, Ruang Publik dan Upaya Membangun Kepercayaan Publik

Ruang publik era saat ini bukan lagi diartikan sebagai ruang dalam batas-batas fisik nyata tetapi dalam bentuk maya (virtual space). Juergen Habermas (2007:41) mengatakan, ruang publik adalah ruang masyarakat privat (sphere of private people) yang berkumpul bersama menjadi sebuah publik. yaitu sebagai ruang yang dihidupi oleh masyarakat dan berfungsi sebagai penghubung antara

mereka (publik) dengan pemerintah. Ketika “A virtual spaces enhances discussion, a virtual sphere enhances democracy”. Atau dengan kata lain, ruang virtual mendorong atau mewujudkan diskusi, sedangkan ruang publik virtual mewujudkan atau mendorong demokrasi. Artinya keberhasilan demokrasi berasal pada keberhasilan pemerintah memberikan informasi yang berasal dari arsip yang autentik. Dari percakapan ruang publik, yang terbangun adalah relasi maya karena kadang kala kita tidak mengenal secara personal pemberi informasi tersebut. Sementara di saat yang bersamaan masyarakat juga kebanjiran informasi dari berbagai bentuk media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, Blog, dan lain sebagainya.

Hal ini pada akhirnya menyebabkan identitas masyarakat di masa depan akan sangat tergantung pada informasi dan sumber mana yang mereka percayai mengingat transisi dari pemerintahan dari government menuju *governance* sendiri melibatkan aktor negara, pasar, maupun masyarakat sipil. Posisi ruang publik berada di antara antar ketiga aktor tersebut yang memungkinkan masing-masing aktor tersebut saling beradvokasi dan bernegosiasi satu sama lainnya. Pemerintah memiliki peran memberikan informasi yang berasal dari arsip yang autentik, pasar ruang publik memiliki peran sebagai jembatan informasi dan masyarakat berhasrat untuk mendapat pemenuhan informasi. Informasi Publik sendiri diartikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan

negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam membangun kepercayaan publik dan upaya memerangi hoaks dapat dilakukan beberapa strategi. Pertama, dalam peraturan perundangan-undangan telah terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka proses penegakan hukumnya, kemudian ada strategi yang sifatnya lebih ke edukasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif, dan yang tidak kalah penting adalah mendorong lembaga publik sebagai pencipta arsip melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dengan baik. Sebagaimana permasalahan terhadap informasi dalam ruang publik virtual yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, arsip memiliki peran penting sebagai jembatan dalam memerangi informasi yang tidak benar (hoaks). Arsip merupakan kristalisasi dalam menjamin ketersediaan informasi yang autentik dan terpercaya sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip.

Penyelenggaraan Kearsipan dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Akhirnya, pemerintah mengeluarkan regulasi yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan



Fragmen Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Keseluruhan bisnis proses dalam SPBE yang dilakukan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah didorong untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Kehadiran dan pelaksanaan SPBE perlu didukung oleh penyelenggaraan kearsipan yang sesuai sehingga dalam skala lebih besar instansi pusat dan pemerintah daerah tidak lepas dari pertanggung jawaban menciptakan arsip yang autentik. Penyelenggaraan kearsipan tersebut meliputi proses penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam hal ini adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan

dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Terlebih SPBE belum memiliki peraturan teknis sebagai turunannya, sehingga misi membangun kepercayaan publik melalui arsip yang autentik dapat dilaksanakan dengan peran ANRI memberikan asupan terhadap materi muatan bidang kearsipan dalam peraturan pelaksanaan SPBE.

Jika ditelisik lebih dalam, bahwa pelaksanaan SPBE, arsip autentik dan memberantas informasi tidak benar (hoaks) merupakan upaya yang saling memiliki relasi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Artinya jika salah satu sebab maraknya hoaks adalah minimnya proses literasi digital yaitu proses mencari informasi, menemukan, mengevaluasi, membuat, memaparkan, hingga menyebarkan kembali informasi tersebut, maka dengan SPBE diharapkan akan menjadi sumber literasi digital yang dilandasi oleh basis data arsip yang autentik dan terpercaya kepada masyarakat.

Hasna Fuadilla Hidayati

ARSIP UNTUK KEDAULATAN BANGSA

Pagi ini begitu berbeda. Sinar matahari begitu hangat menyengat, bahkan udaranya pun terasa asing. Bau asin dan amis yang menyatu secara perlahan menampar wajahku. Sungguh tak biasa.

Aku memang sedang berada di sebuah tempat yang baru bagiku, tepatnya di sebuah desa nelayan di pesisir selatan Jawa Barat. Mulai hari ini, aku dan tujuh mahasiswa lainnya sedang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata, atau yang biasa disebut KKN, sebagai salah satu syarat menuju kelulusan.

Menjelang siang, aku dan teman-teman KKN-ku berangkat menuju balai desa. Semalam, kami telah diberitahu bahwa Pak Kades mengundang kami untuk berbincang-bincang mengenai program KKN yang akan kami laksanakan. Sejujurnya, aku agak tegang membayangkannya, karena kami belum mempersiapkan gagasan apapun. Namun nampaknya aku tak sendirian. Kulihat raut wajah beberapa temanku juga menunjukkan kekhawatiran yang serupa.

Setibanya di balai desa, kami dikejutkan dengan suasana yang agak ramai. Nyaliku makin ciut. Aku tak siap jika harus mempresentasikan program—yang hingga kini masih belum kami tentukan—di depan warga desa.

“Ada apa ya Pak, kok ramai

sekali?” Tiba-tiba Ana, sekretaris tim kami bertanya pada salah satu warga.

“Ada nelayan dari desa ini yang tertangkap dan ditahan di Pulau Christmas, tetapi sekarang sudah bebas dan dipulangkan.” Jawab seorang bapak.

Aku kaget mendengar berita ini. Aku tahu Pulau Christmas. Pulau itu merupakan salah satu pulau di selatan Indonesia. Hanya sayang, pulau ini bukanlah milik Indonesia, melainkan Australia.

Kami pun masuk ke dalam balai desa. Pak Kades yang melihat kami mempersilakan kami untuk duduk dengan warga. Suasana haru langsung terasa. Warga nampak cukup emosional dengan kepulangan beberapa nelayan, bahkan ada beberapa yang sampai menitikkan air mata.

Terdapat enam nelayan yang tertangkap dan kini sudah dipulangkan. Mereka adalah nelayan yang memanfaatkan rumpon untuk menangkap ikan. Pak Wardi selaku tekong kapal pun bercerita bahwa mereka sedang menangkap ikan tuna, hingga tanpa sadar mendekati area perbatasan antara wilayah perairan Indonesia dengan Australia. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Tanpa disangka-sangka, saat itu lewatlah kapal patroli Australia yang sedang berpatroli

untuk mencegah masuknya imigran gelap ke Pulau Christmas. Mereka pun ditangkap, karena dianggap melanggar perbatasan dan telah masuk ke wilayah laut Australia.

“Kok jauh sekali Pak melautnya?” Tiba-tiba temanku Surya bertanya.

“Kami sudah terbiasa untuk melaut jauh. Di sana kami bisa mendapatkan ikan tuna yang lebih besar dan banyak. Bahkan rumpon bisa ditanam dengan jarak 180 mil dari bibir pantai. Asalkan masih di wilayah Indonesia, tidak masalah walau harus melaut sampai jauh.”

“Tapi hari itu kami sedang tidak beruntung. Tanpa sadar rumpon sudah bergeser lokasinya, sehingga kapal kami sampai melewati perbatasan. Sayang, kami terlambat untuk segera kembali ke wilayah laut Indonesia, sampai akhirnya kami tertangkap dan ditahan di Pulau Christmas.” Jawab Pak Wardi.

Setelah ditangkap, kapal dan rumpon mereka pun dibakar, sementara Pak Wardi dan nelayan lainnya ditahan di Pulau Christmas selama beberapa bulan, hingga akhirnya dideportasi dan dipulangkan ke desa asalnya.

Menjelang sore, Pak Wardi dan para nelayan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Pertemuan kami dengan Pak Kades hari ini juga dibatalkan. Aku dan teman-temanku

pun berjalan pulang ke rumah yang kami kontrak selama satu bulan ini.

Dalam perjalanan pulang, aku termenung. Kutatap laut di sebelah kiri jalan yang dihiasi dengan kapal-kapal beraneka warna dengan berbagai ukuran. Aku membayangkan kapal-kapal tersebut berada di tengah laut, ratusan mil jauhnya dari bibir pantai.

“Eh, bengong saja. Mikirin apa sih?” Surya tiba-tiba mengagetkanku.

“Aku bingung. Setahuku, Pulau Christmas itu jaraknya dekat dengan Indonesia, tetapi justru jauh sekali dengan Australia. Kok bisa ya kapal patroli Australia sampai berjaga-jaga di sana, bahkan sampai bisa menangkapi kapal nelayan kita. Padahal Pak Wardi saja bilang kalau mereka tidak masuk sampai jauh ke wilayah Australia.” Ujarku.

“Wajar dong. Pulau Christmas kan dekat dengan perbatasan, sehingga rawan dimasuki oleh imigran gelap. Patroli di wilayah laut juga dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara lho.” Jawab Surya.

“Apa hubungannya patroli laut dengan kedaulatan negara?” Tanya Andi, salah satu teman kelompok KKN kami. Nampaknya ia penasaran dengan pembicaraan kami.

“Coba bayangkan kalau misalnya wilayah laut kita tidak dijaga. Bisa-bisa nanti ada wilayah negara kita yang diambil dan dimanfaatkan sumber dayanya oleh negara lain. Bahkan, bisa jadi ada serangan militer dari negara lain yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa kita sadari. Tentu hal ini akan membahayakan keamanan negara kita.” Jelas Surya.

“Wah, iya juga ya. Aku jadi teringat dengan kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang dulu menjadi sengketa antara Indonesia dengan Malaysia. Apa itu kasusnya sama juga?” Tiba-tiba Ana ikut bergabung dalam obrolan kami.

“Ah, kami harus banyak baca lagi, Na. Kalau kasus Pulau Sipadan dan Ligitan itu berbeda. Pulau-pulau itu memang menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia, hingga masalah itu masuk ke Mahkamah Internasional. Akan tetapi Malaysia akhirnya menang, karena mereka memiliki arsip dari Pemerintah Inggris selaku penjajah Malaysia, yang menerbitkan ordonansi perlindungan satwa burung, penarikan pajak terhadap pengumpulan penyu, dan operasi mercu suar. Sementara Indonesia tidak mampu menunjukkan cukup bukti bahwa Belanda sebagai penjajah Indonesia telah memiliki kedua pulau itu.” Jelas Surya.

“Wah, menarik ini. Ternyata sengketa kedua pulau itu berkaitan dengan masa penjajahan dulu ya.” Aku pun ikut menimpali.

“Betul. Hanya sayang, Indonesia tidak memiliki arsip pendukung terhadap kepemilikan pulau-pulau itu.” Ujar Surya.

“Gawat nih. Bisa-bisa ke depannya akan ada lagi wilayah Indonesia yang lepas kalau tidak kita jaga dengan baik.” Tiba-tiba Ana tampak khawatir.

“Kemungkinan itu bisa dicegah asalkan kita dapat menjaga kedaulatan negara. Makanya, jika kita melihat kasus Pulau Christmas tadi, apa yang dilakukan Australia sudah betul untuk menjaga wilayahnya dari masuknya orang asing tanpa izin resmi. Bukankah hal ini juga sama dengan yang sedang dilakukan oleh Bu Susi, Menteri Kelautan dan Perikanan kita.” Surya melanjutkan penjelasannya.

“Oh iya, yang tenggelamkan kapal asing itu ya?” Ujarku bersemangat.

“Iya betul, seratus untuk kamu, hahaha.” Surya tertawa menimpali.

“Memangnya penentuan batas wilayah laut itu seperti apa sih?” Tanya Andi. “Wah, begini nih kalau tidak belajar sejarah dengan betul, ckckck.”

Surya menggelengkan kepala.

“Iya maaf, soalnya dulu aku tidak terlalu mpedulikan hal seperti ini. Tapi mendengar cerita Pak Wardi tadi berikut penjelasanmu, aku jadi ingin mengerti juga.” Ujar Andi malu-malu.

“Jadi dulu, sebelum Indonesia merdeka, Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan batas laut sejauh tiga mil. Batas itu ditentukan berdasarkan jarak terjauh dari tembakan meriam. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka pun, hukum laut Hindia Belanda ini masih digunakan. Bayangkan, apa yang terjadi jika batas laut Indonesia hanya berjarak tiga mil saja?” Lanjut Surya.

“Kalau begitu, wilayahnya bolong dong? Maksudnya, berarti ada laut di antara pulau-pulau di Indonesia yang bukan merupakan wilayah Indonesia?” Tanyaku.

“Iya betul, jadi di tengah wilayah Indonesia muncul lautan bebas. Ini berarti wilayah Indonesia bukanlah suatu kesatuan wilayah yang utuh, melainkan terpisah-pisah oleh perairan bebas.” Jelas Surya.

“Lalu kelanjutannya bagaimana?” Aku semakin penasaran.

“Karena hukum laut zaman Hindia Belanda dianggap sudah tidak relevan lagi, maka pada 13 Desember 1957, Ir. Djuanda sebagai Perdana Menteri Indonesia saat itu mengeluarkan pengumuman tentang perairan negara Republik Indonesia, yang sekarang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Batas teritorial yang sebelumnya hanya tiga mil, diperlebar menjadi dua belas mil. Selain itu dijelaskan pula bahwa perairan yang menghubungkan pulau-pulau dan daratan Indonesia berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia. Melalui deklarasi ini juga kemudian muncul konsep Wawasan Nusantara. Namun sayang, isi deklarasi ini tidak langsung disetujui oleh dunia internasional” Terang Surya.

CERITA KITA

“Lho, kok bisa?” Tanya Andi.

“Karena ada beberapa negara yang merasa kepentingan maritimnya terganggu. Hal ini juga akan sangat berpengaruh terhadap batas antar negara bukan?” Ujar Surya.

“Iya juga sih. Termasuk kasus Sipadan dan Ligitan itu juga karena wilayahnya berada di perbatasan antar dua negara kan? Makanya terjadi sengketa. Jadi, kalau Indonesia memperluas wilayahnya, maka negara lain juga merasa terancam akan kedaulatan wilayahnya bukan?” Ana ikut menambahkan.

“Bisa jadi begitu, dan bisa jadi pula ada alasan-alasan lain yang di luar pemahaman kita. Namun pada 1982, konsep Wawasan Nusantara akhirnya diakui pada Pertemuan Konvensi Hukum Laut PBB ke-3. Artinya, batas teritorial sejauh dua belas mil telah sah di mata dunia internasional. Selain itu, ditetapkan pula suatu area yang bernama Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil.”

“Tadi kalian ingat tidak, Pak Wardi bilang bahwa rumpon yang dipasangnya bisa mencapai jarak 180 mil? Hal itu masih diperbolehkan selama penangkapan ikan dilakukan di wilayah ZEE Indonesia. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah, ketika nelayan kita keluar dari batas tersebut atau memasuki wilayah negara lain tanpa izin. Begitu juga sebaliknya.” Jelas Surya.

“Berarti nelayan juga harus paham mengenai batas laut ini ya.” Ujarku.

“Iya betul. Agar masing-masing pihak tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam di negara lain.” Surya menambahkan.

“Kok kamu bisa paham sih soal aturan batas laut ini? Aku pikir, anak sejarah sepertimu kerjanya cuma meneliti benda-benda kuno, seperti candi dan kerajaan-kerajaan di

Nusantara dulu, hehe” Ujarku sembari bercanda.

“Eits, jangan salah. Ilmu sejarah itu bukan cuma membahas mengenai hal-hal yang kuno. Tapi juga hal-hal besar pada masa lampau yang dapat menjadi refleksi untuk kepentingan kita di masa kini dan masa depan. Lagipula, penelitian candi itu tugasnya arkeolog, bukan sejarawan, hahaha.” Surya tertawa.

“Lho, kalau bukan candi, terus ilmu sejarah meneliti lewat apa?” Tanyaku.

“Ada banyak sumber sejarah lainnya, dan itu tergantung pula pada zamannya. Candi maupun artefak memang bisa menjadi sumber sejarah. Tapi tidak semua zaman menghasilkan artefak. Apalagi di zaman modern seperti sekarang, kita bisa mengetahui peristiwa di masa lampau berdasarkan arsip yang tercipta dari kehidupan masyarakat maupun bernegara. Arsip sendiri ada banyak bentuknya, selain kertas, foto dan film pun bisa menjadi arsip lho.” Jawab Surya.

“Jangan-jangan, kamu paham soal batas laut itu juga dari arsip ya?” Tanya Ana.

“Iya. Selain dari membaca buku, aku juga pernah melihat arsip mengenai Deklarasi Djuanda sampai penetapan Hari Nusantara di Arsip Nasional Republik Indonesia. Di sana juga tersimpan berbagai macam arsip penting Indonesia lainnya, yang harus dijaga kelestariannya agar tidak musnah. Supaya kedaulatan negara kita tidak terancam. Ambil contoh seperti kasus Sipadan Ligitan tadi, dimana arsip memainkan peran penting.” Jelas Surya.

“Wah, unik ya. Kapan-kapan, aku jadi ingin kesana untuk melihat-lihat arsip Indonesia lainnya.” Kataku bersemangat. Ana dan Andi pun mengangguk setuju.

“Boleh. Arsip Nasional juga punya Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa lho. Nanti kita bisa melihat-lihat diorama, sambil belajar sejarah Indonesia lainnya.” Ujar Surya.

“Bagaimana kalau minggu ini kita berkunjung ke Arsip Nasional? Aku jadi kepikiran untuk membuat program KKN berupa penyuluhan mengenai pentingnya arsip untuk kedaulatan bangsa di sekolah-sekolah daerah ini.” Cetusku tiba-tiba.

“Eh, benar juga. Kok aku tidak sampai kepikiran kesitu ya. Nanti kita juga bisa mengkopi arsip untuk ditunjukkan kepada para siswa di sekolah. Pasti banyak arsip-arsip menarik yang bisa kita dapatkan nanti.” Surya nampak bersemangat mendengar ideku.

“Iya ya. Apalagi ada Surya yang juga bisa menjelaskan sejarah bangsa kita. Pasti seru sekali. Aku juga ingin mendengar kisah-kisah sejarah lainnya beserta bukti-bukti yang ada di dalam arsip.” Ujar Andi. Aku pun semakin bersemangat, apalagi sepertinya teman-teman yang lain pun setuju terhadap ideku.

Tak terasa, tibalah kami di rumah kontrakan. Perlahan-lahan, matahari pun tenggelam dan menyisakan kegelapan. Namun, hatiku masih terang dan seperti membuncah, tak sabar untuk segera melanjutkan rencana-rencana yang telah kami susun selama perjalanan pulang. Sungguh, ini adalah hari yang istimewa, pikirku.

Rumpon: Alat bantu penangkapan ikan yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul dalam suatu area penangkapan.

Tekong: Sebutan untuk kapten kapal.

HIDAYAT NUR WAHID KUNJUNGI ANRI



Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid berkunjung ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 3 Januari 2019.

Jakarta, ARSIP. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid berkunjung ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kepala ANRI, Mustari Irawan beserta jajarannya menyambut baik kehadiran Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

Pada kesempatan ini, Hidayat Nur Wahid didampingi Mustari Irawan beserta jajaran melihat depo penyimpanan arsip statis, ruang layanan arsip statis, dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa.

Wakil Ketua MPR juga berkesempatan melihat sebagian

khazanah arsip di ANRI, seperti, naskah asli Proklamasi yang dituliskan tangan oleh Soekarno, foto-foto tokoh pergerakan nasional, dan sejumlah konferensi perdamaian yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Belanda.

“Lebih dari dua juta foto, film dan gambar yang disimpan di ANRI. Tetapi masih banyak arsip yang belum seluruhnya dapat dikumpulkan di sini, karena berbagai persoalan. Mudah-mudahan, kunjungan Wakil Ketua MPR, dapat menambah semangat kami dalam mengusahakan terkumpulnya arsip lain, dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk gemar

mengunjungi ANRI,” tutur Mustari.

Diakhir kunjungan, Hidayat mengapresiasi segenap pimpinan ANRI yang telah menerima kedatangannya, sekaligus memberi pencerahan terkait sejarah Indonesia.

“Kecintaan saya terhadap NKRI terasa disegarkan kembali, setelah melihat koleksi ANRI. Karena itu mari kita senantiasa mengunjungi ANRI, agar kecintaan kita pada bangsa Indonesia terus terjaga, sebagaimana kecintaan para pahlawan kepada bangsa dan negara ini”, ungkap Hidayat Nur Wahid. (is)

PENANGANAN ARSIP PASCA BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA DI BANTEN



Rapat koordinasi Tim Restorasi Arsip ANRI dengan TNI, POLRI, Tim Penanggulangan Bencana dan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banten

Banten, ARSIP. Setelah berkoordinasi dengan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banten, tim Restorasi Arsip ANRI (2/1) bergerak ke lokasi bencana. Lokasi pertama yang dikunjungi yaitu tempat pengungsian Taman Hutan Raya (Tahura) di daerah Carita. Di lokasi sudah dibangun posko dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Banten lengkap dengan petugasnya yang mendampingi dan memberikan bantuan ke para pengungsi.

“ANRI harus ikut membantu menyelamatkan dokumen masyarakat kami..” kalimat itu salah satu pesan yang disampaikan Bupati Pandeglang kepada tim Restorasi saat penyambutan menuju posko terpadu. Adapun daerah yang banyak kena

dampak tsunami adalah pesisir pantai Selat Sunda, dimana kebanyakan bangunan yang ada seperti penginapan, warung atau restoran dan rumah penduduk namun tidak sebanyak warung atau tempat usaha wisata lainnya. Jarak antar daerah atau lokasi yang terkena dampak tsunami yang berjauhan dan harus ditempuh kendaraan hingga 3 sampai 4 jam menyebabkan hanya sebagian kecil saja yang dapat dikunjungi tim Restorasi dan semuanya di pesisir pantai Selat Sunda mulai dari pesisir pantai Carita sampai dengan Labuan dan Pandeglang.

Sampai hari ke 10 (sepuluh) setelah kejadian tsunami, konsentrasi masyarakat dan tim terpadu bencana masih penanganan korban atau jiwa

yang belum ditemukan, dievakuasi atau ditangani secara medis. Belum ada anggota masyarakat yang melaporkan atau membawa berkasnya ke posko terpadu tim penanggulangan bencana. Melihat kondisi seperti itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pandeglang bapak Haji Agus mengharapkan agar tim Restorasi ANRI dapat memberikan pembekalan atau bimbingan teknis tentang bagaimana penanganan arsip yang terdampak bencana kepada pegawai dan pengelola arsip yang berada di daerah yang terdampak bencana.

KEPALA ANRI KUNJUNGI PUSAT TEKNOLOGI PENERBANGAN LAPAN

Bogor, ARSIP. Kepala ANRI Mustari Irawan didampingi Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ANRI mengunjungi Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN di Rumpin-Bogor (29/1). Kunjungan Kepala ANRI diterima langsung oleh Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin dan Jajaran.

Tujuan kunjungan tersebut berkaitan dengan Integrasi Pengolahan Arsip inaktif berkelanjutan melalui pembentukan Pusat Arsip Riset Statistik, Geospasial dan Kedirgantaraan yang akan direncanakan di Komplek Perkantoran LAPAN di daerah Rumpin, Bogor.

Pasal 21 Undang-undang no.43 Tahun 2019 tentang Kearsipan mengamanatkan bahwa “untuk kepentingan penyelamatan arsip pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. ANRI dapat membentuk depot dan/ atau tempat penyimpanan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan”.

Selanjutnya diperjelas dalam pasal 59 Peraturan Presiden (Perpres) no.28 Tahun 2012 dikemukakan bahwa arsip inaktif yang dipindahkan ke unit depot menjadi wewenang dan tanggung jawab ANRI, tetapi status kepemilikan arsip masih berada pada pencipta arsip”. Dan “Pemindahan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan dapat dilakukan oleh Lembaga



Kepala ANRI Mustari Irawan didampingi Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ANRI mengunjungi Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN di Rumpin-Bogor (29/1).

Negara di pusat ke unit depot ANRI yang berada di pusat”. Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum ANRI membangun depot arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan di lembaga pusat.

Selain itu riset, statistik, geospasial dan kedirgantaraan merupakan bidang yang secara substantif memiliki nilai berkelanjutan bagi kepentingan manajemen pemerintahan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepentingan kesejahteraan, serta sebagai memori, identitas, dan jati diri bangsa.

Arsip tematik seputar riset, statistik,

geospasial dan kedirgantaraan memiliki peran sangat penting untuk menjaga kesinambungan masa lalu dengan masa kini, dalam rangka membangun kehidupan masa depan yang lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengintegrasian arsip dan informasi tersebut untuk memberi kemudahan akses dan kelancaran pelayanan publik dalam suatu fasilitas yang terpadu dan modern. (Inh)

GNSTA DI KABUPATEN SOLOK

Solok, ARSIP. Arosuka, Kabupaten Solok (21/2) - Kepala ANRI, Mustari Irawan memberikan sambutan dan arahan dalam kegiatan Pencanangan Buku Bergulir di Nagari dan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan & Arsip Kabupaten Solok.

Dalam sambutan dan arahnya, Kepala ANRI menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pada dasarnya sudah memiliki landasan peraturan perundangan yang kokoh, hanya kesadaran dan perhatian perangkat pemerintah terhadap pentingnya informasi yang terkandung di dalam Arsip, dirasakan masih kurang.

Kepala ANRI menambahkan bahwa GNSTA merupakan sebuah upaya bagi seluruh penyelenggara kearsipan di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintahan yang sesuai kaidah peraturan. Dalam gerakan ini disampaikan beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu tertib kebijakan, tertib organisasi, tertib SDM Kearsipan, tertib sarana prasarana kearsipan, tertib pengelolaan arsip, dan tertib pendanaan kearsipan.

Melalui kegiatan ini, Kepala ANRI juga menekankan pentingnya dukungan Pimpinan Daerah dan SKPD kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Solok, salah



satunya melalui tertib pengelolaan arsip sejak fase penciptaan di SKPD.

Pelaksanaan Pencanangan GNSTA dipandang penting sebagai faktor pendorong dan percepatan atas peningkatan kesadaran dan kepatuhan seluruh perangkat pemerintah daerah Kabupaten Solok dalam penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan kearsipan tersebut, diharapkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok akan semakin baik dan ketersediaan arsip sebagai memori kolektif daerah yang akan semakin terjamin keberadaannya.

Kegiatan pencanangan ini dimulai dengan pembacaan laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Solok, Pengukuhan Bunda Membaca oleh Perwakilan Perpustakaan Nasional RI, Sambutan dan arahan Kepala ANRI, Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, dan Penandatanganan Komitmen Bersama seluruh anggota Musyawarah Pimpinan Daerah serta Wali Nagari di lingkungan Kabupaten Solok yang hadir pada acara ini. Penandatanganan ini disaksikan oleh tamu undangan dari Lembaga Kearsipan Daerah se-Provinsi Sumatera Barat. (AM)

ANRI GELAR RAKORNAS PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2019



Acara Rakornas Pengawasan Kearsipan Tahun 2019 dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, Kepala ANRI, Mustari Irawan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diwakili oleh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Rini Widyantini.

Padang, ARSIP. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), melalui Pusat Akreditasi Kearsipan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Kearsipan Tahun 2019. Acara Rakornas diselenggarakan di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat (27/02).

Acara Rakornas dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, Kepala ANRI, Mustari Irawan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Deputi Kelembagaan dan Tata

Laksana, Rini Widyantini.

Acara Rakor ini dipandang sangat penting untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan kualitas penyelenggaraan kearsipan di masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah.

“Tentunya hal ini merupakan bukti dan komitmen kami sebagai lembaga pembina kearsipan nasional untuk senantiasa memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan”, tutur Mustari dalam arahannya.

Lebih lanjut Mustari menambahkan

Hal ini dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri tersebut mengatur bahwa Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan salah satu komponen dalam penilaian reformasi birokrasi. Dengan harapan agar bangsa ini mendapatkan



Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan, Rudi Anton memberikan pemaparan mengenai pengawasan kearsipan

potret penyelenggaraan kearsipan, yang tentunya akan terus kita tingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu.

“Apa yang dilaksanakan ANRI pada hari ini adalah hal yang baik. Kementerian PANRB mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh ANRI dalam melaksanakan pengawasan kearsipan di Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah”, terang Rini Widyantini.

Rini menambahkan bahwa hal ini dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri tersebut menetapkan kualitas pengelolaan arsip di Instansi Pemerintah sebagai salah satu target dalam program Reformasi Birokrasi.

“Terkait hal tersebut, hasil penilaian

pengawasan kearsipan merupakan salah satu komponen dalam penilaian Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah”, jelasnya.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat menyampaikan pentingnya Rakornas Pengawasan Kearsipan agar penyelenggaraan kearsipan dapat menjadi lebih baik. “yang kurang-kurang menjadi cukup, yang cukup menjadi baik, yang baik menjadi sangat baik”, tutur Irwan Prayitno.

Gubernur Sumatera Barat menyambut baik para peserta Rakornas dan mengucapkan terima kasih kepada ANRI telah menyelenggarakan Rakornas di Sumatera Barat.

Dalam laporan, Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan, Rudi Anton menyampaikan bahwa peserta Rakornas yang hadir berasal dari Kementerian/Lembaga, Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Kepala Lembaga Kearsipan Daerah

Kabupaten/Kota.

Dalam Rakornas kali ini, diserahkan pula penghargaan kearsipan kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terbaik berdasarkan hasil pengawasan kearsipan eksternal, serta menyerahkan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu dilakukan juga penyerahan Akreditasi Kearsipan dimana hal ini suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan pengakuan formal oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terhadap kelayakan dan mutu penyelenggaraan kearsipan oleh unit kearsipan, lembaga kearsipan, serta lembaga penyelenggara jasa dan diklat kearsipan sesuai prinsip, standar dan kaidah kearsipan yang ditetapkan dalam Keputusan dan Sertifikat Akreditasi Kearsipan oleh Kepala ANRI. (IS)

Info lengkap mengenai Daftar Penerima Penghargaan dapat dilihat di <https://www.anri.go.id/detail/1672-ANRI-GELAR-RAKORNAS-PENGAWASAN-KEARSIPAN-TAHUN-2019>

DKPP SERAHKAN ARSIP PUTUSAN TAHUN 2016-2017 KE ANRI

Jakarta – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima arsip statis 240 putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode tahun 2016 sampai dengan 2017. Arsip statis tersebut secara simbolis diserahkan Ketua DKPP, Harjono kepada Sekretaris Utama ANRI, Sumrahadi di Lantai 4 Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jl. MH.Thamrin, Jakarta Pusat (4/3). Pada kesempatan ini, turut hadir pula anggota Bawaslu Abhan, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro dan pejabat pimpinan tinggi madya serta pratama terkait di lingkungan ANRI.

Penyerahan arsip DKPP ke ANRI ini merupakan kali kedua. Menurut Harjono, kegiatan tersebut menjadi bentuk kepatuhan terhadap undang-undang. Tak hanya itu, arsip akan menjadi sejarah penting dalam membangun bangsa. “Dengan adanya arsip membangun bangsa tak hanya dikira-kira, tapi berdasarkan informasi yang ada dalam arsip,” tegas Harjono.

Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja yang turut hadir dalam acara ini mengungkapkan bahwa dengan diserahkan arsip statis DKPP kepada ANRI, putusan DKPP dan berbagai dinamika yang dihadapi DKPP dapat diakses oleh publik pada masa mendatang. Karena setiap masa ada keunikan-keunikan dinamika yang berkaitan dengan pemilu, baik yang ditangani Bawaslu maupun DKPP

Sementara itu, Sumrahadi menyatakan ANRI menyambut baik



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima arsip statis 240 putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode tahun 2016 sampai dengan 2017. Arsip statis tersebut secara simbolis diserahkan Ketua DKPP, Harjono kepada Sekretaris Utama ANRI, Sumrahadi di Lantai 4 Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jl. MH.Thamrin, Jakarta Pusat (4/3).

penyerahan arsip statis dari DKPP, karena ini pun bagian dari upaya ANRI menyelamatkan memori kolektif bangsa. “Ke depan kami juga berharap penyelamatan arsip baik dari DKPP maupun Bawaslu tetapakan berlanjut, apalagi saat ini pun DKPP dan Bawaslu telah memiliki instrumen pengelolaan arsip dinamis yang dapat mendukung pengelolaan arsip yang baik dan benar, termasuk juga penyerahan arsip statis,” terang Sumrahadi.

Sebagai informasi, saat ini ANRI juga sedang gencar menyelamatkan arsip bertema pemilihan umum (pemilu). Arsip dengan tema pemilu dapat memori yang penting bagi bangsa Indonesia dan generasi mendatang karena dapat menggambarkan

dinamika perjalanan kehidupan politik suatu bangsa. Arsip yang diserahkan DKPP juga mewariskan informasi yang berharga karena berisi berbagai hal terkait dengan pelanggaran dan penyimpangan penyelenggaraan pemilu dan upaya pengawasannya, baik pengawasan terhadap pelaksanaannya maupun terhadap perilaku para penyelenggaranya.

Penyerahan arsip statis oleh DKPP kepada ANRI ini menjadi salah satu wujud pelaksanaan amanat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Selain itu, kegiatan penyerahan arsip statis ini juga menjadi komitmen DKPP untuk tertib pengelolaan arsip, khususnya pada poin pelaksanaan penyusutan arsip sesuai dengan prosedur. (tk)

KAB. CILACAP TERIMA CITRA DAERAH DARI ANRI



Cilacap (20/3) – Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan menyerahkan Citra Daerah Kabupaten (Kab.) Cilacap kepada Bupati Cilacap, Tatto Suwanto Pamuji di alun-alun Kab. Cilacap. Penyerahan Citra Daerah tersebut menjadi salah satu hadiah bagi Kab. Cilacap, karena bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-163 Kab. Cilacap yang jatuh pada 21 Maret.

Pada kesempatan ini Mustari menyampaikan bahwa penerbitan Citra Daerah merupakan salah satu program ANRI dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai khazanah arsip statis Kab. Cilacap yang telah

tersimpan di ANRI. “Citra Daerah Kab. Cilacap yang diterbitkan ANRI didukung oleh data yang terkandung dalam arsip yang di dalamnya merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Adapun khazanah arsip yang digunakan dalam penyusunan Citra Daerah Kab. Cilacap, terdiri dari berbagai arsip dalam bentuk tekstual, peta, maupun foto,” papar Mustari.

Citra Daerah juga merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah. Sebagai informasi, Kabupaten Cilacap ini merupakan

kabupaten/kota ke-37 yang telah menerima Citra Daerah yang diterbitkan ANRI. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya, ANRI telah memberikan Citra Daerah kepada 36 kabupaten/kota.

Selain menyerahkan Citra Daerah, Kepala ANRI juga resmikan pameran arsip bertema Kab. Cilacap dalam Arsip. Arsip yang dipamerkan merupakan khazanah arsip foto milik ANRI dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Cilacap. Adapun pameran arsip diselenggarakan mulai 20 s.d 22 Maret 2019 di Pendopo Bupati Cilacap. (tk)

ANRI GELAR RAKORNAS SIKN DAN JIKN TAHUN 2019

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional selenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Acara Rakornas dilaksanakan di Hotel Merlynn Park, Jakarta, 8-10 April 2019 dan dibuka langsung oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan.

“Melalui kegiatan temu jaringan dalam satu kesatuan JIKN ini, diharapkan Komunikasi yang efektif dapat dibangun serta ditingkatkan antara Pusat Jaringan Nasional (ANRI) dan Simpul Jaringan”, tutur Mustari dalam sambutan.

Selain itu, diharapkan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan ditingkatkan untuk penguatan layanan informasi arsip kepada masyarakat dan pemahaman yang komprehensif dikembangkan secara signifikan terhadap pemanfaatan SIKN-JIKN sebagai layanan informasi arsip berbasis daring (online).

Pada kesempatan ini, Kepala ANRI memberikan piagam penghargaan Simpul Jaringan Percontohan Tahun 2019 kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Kearsipan Daerah Kota Bukittinggi.

Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) diamanatkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah menempatkan Program Pengelolaan Sistem dan



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN) selenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Acara Rakornas dilaksanakan di Hotel Merlynn Park, Jakarta, 8-10 April 2019 dan dibuka langsung oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan.

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sebagai salah satu Program Prioritas Nasional dalam Nawa Cita Tahun 2015–2019, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, untuk mewujudkan penerapan open government, yang merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sebagai program prioritas nasional, target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2015 s.d. 2019 sebanyak 255 simpul jaringan (SJ) dari sekitar 940 SJ. Sampai dengan tahun 2018, 205 instansi pusat dan daerah telah bergabung menjadi simpul jaringan.

Manfaat yang dapat diambil dengan pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional ini diantaranya sebagai berikut, pertama, pencipta arsip (kementerian/lembaga) dapat menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, Lembaga kearsipan dapat mempromosikan khazanah arsip statis yang dimilikinya dan saling berbagi informasi arsip statis dengan lembaga kearsipan lainnya.

Ketiga, masyarakat sebagai pengguna arsip sudah dapat mengakses informasi arsip berbasis daring (online) untuk kebutuhan publik yang menyediakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui website jkn.go.id. Terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. (is)

ANRI LUNCURKAN NASKAH SUMBER ARSIP PEMILU 1955

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Lembaga Kearsipan Nasional melaksanakan peluncuran naskah sumber arsip sekaligus talk show dengan tema “Jejak Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 1955” yang dilaksanakan di Gedung Arsip Nasional jalan Gajah Mada, nomor 111, Jakarta Barat. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud partisipasi ANRI dalam memeriahkan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019.

Acara dibuka Kepala ANRI, Mustari Irawan. Sementara itu, talk show dipandu moderator Melati Novel dan menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu: (1) Prof. Dr. R Siti Zuhro, MA mengulas Kilas Balik Pemilu 1955 dalam Sejarah Demokrasi Indonesia; (2) Asep Kambali membahas Nilai-nilai Ke-Indonesian dalam Pemilu 1955 dan Refleksi bagi Generasi Milenial; dan (3) M. Taufik mengulas Pelestarian dan Pemanfaatan Arsip Pemilu 1955 sebagai Memori Kolektif Bangsa.

Penerbitan naskah sumber arsip ini menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan ANRI untuk memudahkan publik untuk mengakses atau memanfaatkan arsip yang disimpan di ANRI sesuai dengan tema-tema tertentu yang diterbitkan. Mustari menyampaikan bahwa melalui penerbitan naskah sumber ini, diharapkan dapat memberikan pelajaran yang baik bagi semua komponen masyarakat dalam menambah wawasan pengetahuan dan pendidikan agar mereka tidak buta dengan politik. “Pemilu 1955 ini juga jika kita lihat arsipnya, mengingatkan kepada asas berkesamaan yang saat ini tidak berlaku lagi. Pemilu 1955 juga menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu ini kita dapat memberikan pelajaran yang baik dalam berpolitik,” jelas Mustari.

Senada dengan Kepala ANRI, Prof. Siti Zuhro juga menyatakan



Talk show dengan tema “Jejak Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 1955” yang dilaksanakan di Gedung Arsip Nasional jalan Gajah Mada, nomor 111, Jakarta Barat. Talk show dipandu moderator Melati Novel dan menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu: (1) Prof. Dr. R Siti Zuhro, MA mengulas Kilas Balik Pemilu 1955 dalam Sejarah Demokrasi Indonesia; (2) Asep Kambali membahas Nilai-nilai Ke-Indonesian dalam Pemilu 1955 dan Refleksi bagi Generasi Milenial; dan (3) M. Taufik mengulas Pelestarian dan Pemanfaatan Arsip Pemilu 1955 sebagai Memori Kolektif Bangsa.

bahwa dengan terbitnya naskah sumber arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955, menjadi salah satu medium pembelajaran yang baik bagi kita untuk mengetahui pesta demokrasi masa silam. “Saya berharap semoga ANRI dapat menerbitkan karya monumental lain,” tambahnya.

Pada naskah sumber arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 yang penulisannya dilakukan seorang arsiparis ANRI, Mudanto Pamungkas menampilkan berbagai macam arsip tekstual dan foto yang penyajiannya disertai dengan uraian tentang konteks peristiwanya. Adapun dalam proses penerbitannya, dilakukan penelusuran tentang arsip yang berkaitan dengan kehidupan politik dan tata pemerintahan di era Demokrasi Parlementer. Arsip tersebut seluruhnya disimpan di ANRI yang terdapat dalam khazanah arsip Kabinet Presiden Republik Indonesia 1950 – 1959, Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri Jilid I & II, Kementerian Penerangan 1954 – 1956 dari berbagai daerah, Nahdlatul Ulama 1948 – 1979, serta berita Antara.

Adapun tujuan dari penulisan naskah sumber arsip Jejak Demokrasi dalam Pemilu 1955 adalah menyampaikan kepada masyarakat mengenai khazanah arsip pemilu yang ada di ANRI, khususnya arsip yang berkaitan dengan Pemilu 1955. Dengan demikian masyarakat pengguna arsip dapat lebih mudah mengakses tanpa perlu melakukan penelusuran arsip dalam waktu yang lama. Sementara itu, penulisan naskah sumbernya berfokus pada memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante (lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk undang-undang dasar baru untuk menggantikan Undang-undang Dasar Sementara 1950). Selain itu, dikemukakan juga mengenai proses pelaksanaan pemilu yang dimulai dari tahap persiapan antara lain kontestan, biaya penyelenggaraan, pendataan dan pendaftaran pemilih, pencetakan surat suara dan lain-lain hingga hasil perolehan suara untuk DPR dan Konstituante. Selain itu, ada hal yang lain yang dikemukakan dalam penulisan naskah sumber ini, yaitu mengenai demokrasi, budaya politik, etika politik, dan pendidikan politik.

ANRI LAKSANAKAN BIMTEK SIKD UNTUK BUMN



Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI Andi Kasman M. pada acara bimtek memberikan materi tentang Kebijakan Kearsipan Nasional

Palembang, 13 April 2019- Pengelolaan Arsip Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Hakekatnya Pengelolaan Atas Informasi Manajemen Perusahaan. Oleh karena itu agar Pengelolaan Arsip di lingkungan BUMN dapat dilaksanakan secara Efektif dan Efisien diperlukan dukungan Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis berbasis TIK dan ketentuan fungsional yakni Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Instansi yang bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kearsipan Nasional memiliki Tanggung Jawab dan Kewenangan dalam Membangun serta Menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) berbasis

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Upaya penerapan SIKD berbasis TIK salah satunya diarahkan pada Lembaga Kearsipan BUMN. Dalam Upaya tersebut, ANRI melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengenalan SIKD dan Penyusunan Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan BUMN.

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI Andi Kasman M. pada acara bimtek memberikan materi tentang Kebijakan Kearsipan Nasional sekaligus menutup acara Bimtek sedangkan Acara bimtek dibuka oleh Direktur Kearsipan Pusat ANRI, Azmi. Bimtek dilaksanakan dari tanggal 11 – 13 April 2019 di Hotel The Zuri, Palembang.

Sementara itu bimtek dipandu

moderator Sulistyowati dengan menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Direktur Kearsipan Pusat ANRI Azmi membawakan materi Pengantar Pengelolaan Arsip Dinamis berbasis TIK serta Kepala Biro Umum Multi Siswati membawakan materi Pengelolaan Arsip Dinamis berbasis TIK di lingkungan ANRI.

Bimtek diikuti oleh Sepuluh (10) BUMN yaitu ; PT. Sarinah (persero), PT. Indofarma (persero), PT. Rajawali Nusantara Indonesia (persero), PT, Adhi Karya (persero), PT. Jasa Marga (persero), PT. PAL Indonesia (persero), PT, Sarana Multiguna Financial (persero), PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) (persero), Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (persero), dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (persero).(Inh).

KEMENPAN RB MEMBUKA ACARA RANGKAIAN KEGIATAN HARI KEARSIPAN 2019

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin didampingi Kepala ANRI, Mustari Irawan, dan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah membuka acara Rangkaian Kegiatan Hari Kearsipan Ke-48 dan Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2019 di Makassar.

“Saya mengapresiasi Rakornas ini, sebagai momentum refleksi dalam rangka menguatkan komitmen untuk melakukan pembenahan pengelolaan arsip yang lebih baik secara menyeluruh, sistematis, dan dinamis”, ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin pada saat memberikan sambutan.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah sangat mengapresiasi acara Rakornas dan berterima kasih kepada ANRI yang telah memberikan kepercayaan kepada Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah Peringatan Hari Kearsipan Ke-48.

Pada tahun ini, Peringatan Hari Kearsipan Ke-48 mengusung tema “Arsip Merajut Keberagaman”. Penyelenggaraan Rangkaian Peringatan Hari Kearsipan Ke-48 berlangsung sejak 25-28 April 2019.

Dalam rangka menyemarakkan Hari Kearsipan Ke-48, ANRI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya: Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kearsipan, Sosialisasi Peraturan Kearsipan, Evaluasi Sistem Informasi



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin didampingi Kepala ANRI, Mustari Irawan, dan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah membuka acara Rangkaian Kegiatan Hari Kearsipan Ke-48 dan Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2019 di Makassar.

Kearsipan Dinamis, Rakornas Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, Penyerahan Arsip Statis dan Sosialisasi Kerja Sama Kearsipan. Selain itu, digelar pula Rakor SDM Kearsipan, Executive Meeting Pimpinan Lembaga kearsipan, Lomba Desain Maskot Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, ANRI Award, Pameran Arsip Nusantara, Pekan Olah Raga dan Seni, dan Senam Massal pada acara Car Free Day.

Adapun peserta yang diundang pada acara Peringatan Hari Kearsipan Ke-48 dan Rakornas Kearsipan Tahun 2019 diantaranya Pimpinan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Kearsipan Daerah, dan SDM Kearsipan.

Hari Kearsipan di Indonesia tiap tahunnya diperingati di tiap tanggal 18 Mei. 18 Mei 1971 merupakan tonggak lahirnya Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Undang-Undang ini lahir sebagai pembuktian bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap pentingnya arsip dalam kehidupan kenegaraan dan pemerintahan.

Mengingat pentingnya momentum tanggal 18 Mei, melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: OT.00/02/2005 tentang Hari Kearsipan menjadikan tanggal tersebut sebagai Hari Kearsipan. Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 memiliki nilai kesejarahan dan merupakan bukti adanya kesadaran penuh dan sikap politik bangsa Indonesia bahwa kearsipan memiliki nilai penting bagi setiap sendi kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (is)

ANRI GELAR PENGHARGAAN KEARSIPAN 2019



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) gelar Gala Dinner dan Malam Penganugerahan Kearsipan Tahun 2019. Kegiatan ini berlangsung sangat meriah dan digelar di The Rinra Hotel, Sabtu (27/4/2019) malam. Para tamu yang hadir merupakan perwakilan dari provinsi maupun kota yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Acara dibuka dengan tarian khas daerah Sulsel, Pepeka Ri Makka. Tarian ini sukses menghibur para penonton. Tari dengan atraksi semburan api oleh para penari cantik ini, juga mengajak para tamu untuk tersembur oleh api.

Pada kesempatan ini, dilaksanakan pula Acara launching maskot Ayo, Tertib Arsip yang membuat audiens

terkejut atas kehadiran maskot tersebut. Maskot Ayo, Tertib Arsip merupakan hasil sayembara yang dimenangkan oleh Andri Muamar Sidik dari Bandung.

Acara dilanjutkan dengan pengumuman Penganugerahan Penghargaan Kearsipan Tahun 2019 yang diikuti oleh seluruh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain Penganugerahan Penghargaan Kearsipan, dilaksanakan pula acara Pemberian Penghargaan Pameran Khazanah Nusantara Terbaik, Penganugerahan Juara Pekan Olahraga dan Seni Kearsipan di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan, Penyerahan Citra Daerah

Kabupaten Toraja Utara, Serah Terima Persetujuan JRA kepada 9 Pemerintah Daerah, Pengukuhan Assesor SDM Kearsipan, Pembentukan Tempat Uji Kompetensi Kearsipan, & Penandatanganan Pakta Integritas, Penandatanganan MOU antara ANRI dengan Universitas Terbuka, dan Penyerahan Hasil Rekomendasi Rakornas Kearsipan Tahun 2019. (is)

Info daftar para pemenang dapat dilihat pada:

- 1) <http://www.anri.go.id/assets/collections/files/2019/ANRI AwardsUK.pdf>
- 2) <http://www.anri.go.id/assets/collections/files/2019/ANRI AwardsLKD.pdf>

KEMENDIKBUD SERAHKAN ARSIP STATIS KE ANRI



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serahkan arsip statisnya ke ANRI, 2 Mei 2019. Serah terima arsip statis ini dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi kepada Sekretaris Utama ANRI, Sumrahyadi dan disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serahkan arsip statisnya ke ANRI. Acara serah terima arsip statis bertepatan dengan Acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tanggal 2 Mei 2019 di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta.

Serah terima arsip statis ini dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi kepada Sekretaris Utama ANRI, Sumrahyadi dan disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta dihadiri oleh para pejabat di lingkungan ANRI dan Kemendikbud pada Acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hal ini menggambarkan keseriusan Kemendikbud dalam menangani kearsipan dan hal ini membuat ANRI optimis bahwa kearsipan di lingkungan Kemendikbud akan semakin tertib,

semakin baik dan semakin maju karena kesadaran seluruh pejabat dan pegawainya semakin meningkat.

Serah terima arsip statis ini merupakan momentum yang sangat berharga karena mewariskan jejak sejarah bangsa Indonesia. Arsip statis Kemendikbud yang diserahkan ke ANRI pada hari ini sebanyak 376 Berkas (Kertas dan Media Baru), yakni arsip Keputusan-keputusan Menteri, laporan-laporan penelitian, penghargaan UNESCO, dan Video Kebudayaan. Arsip tersebut merupakan memori yang sangat penting bagi kita dan generasi mendatang karena menggambarkan sejarah bangsa.

Dengan diserahkannya arsip statis Kemendikbud ke ANRI, maka 2 (dua) hikmah sekaligus yang diperoleh, yakni:

pertama, Kemendikbud telah meninggalkan jejak memori yang sangat berharga bagi negara dan bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi mendatang. Kedua, Kemendikbud telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa lembaga negara wajib menyerahkan arsip statis ke ANRI.

Kemendikbud merupakan salah satu lembaga negara yang rutin menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI. Kemendikbud pada kurun waktu lima tahun terakhir sudah menyerahkan arsip statis sebanyak 4 kali. Hal ini menunjukkan kepedulian Kemendikbud dalam upaya berperan serta melestarikan dan memanfaatkan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa. (is)

BADAS BULELENG DILUNCURKAN PADA PERINGATAN HARI KEARSIPAN NASIONAL KE-48 TAHUN 2019



Peluncuran Bank Data Arsip Statis (BADAS) yang merupakan inovasi dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng untuk menghadirkan arsip dekat dengan masyarakat guna mendukung pariwisata bali khususnya untuk wilayah Buleleng.

Buleleng, Bali (21/5/2019) - Dalam rangka Peringatan Hari Kearsipan Nasional ke 48 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Buleleng melaksanakan serangkaian kegiatan kearsipan di antaranya lomba Kearsipan Desa/Kelurahan, penyerahan Hasil Pengawasan Internal Organisasi Perangkat Daerah/ Kecamatan se- Kab.Buleleng.

Pada acara yang dilaksanakan di Hotel Banyu Alit Singaraja, juga diluncurkan Bank Data Arsip Statis (BADAS) yang merupakan inovasi dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng untuk

menghadirkan arsip dekat dengan masyarakat guna mendukung pariwisata bali khususnya untuk wilayah Buleleng.

Mustari Irawan selaku Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), turut hadir langsung dan memberikan sambutan guna mendukung Semarak Pariwisata Buleleng melalui BADAS. Mustari Irawan memberikan apresiasi dan mengharapkan agar inovasi kearsipan harus terus ditingkatkan, melalui BADAS diharapkan kesadaran masyarakat terhadap arsip semakin meningkat karena arsip hadir sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Buleleng Putu Agus Suradyana menyampaikan terima kasih kepada Kepala ANRI yang telah berkenan hadir memenuhi undangan dari Kabupaten Buleleng. Beliau menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Daerah Kab. Buleleng terhadap bidang kearsipan sangat tinggi dan siap mendukung program-program Pemerintah Pusat salah satunya rencana Pembangunan Depot Arsip Berkelanjutan di wilayah Buleleng (IT).

ANRI BAHAS GRAND DESIGN KEARSIPAN DENGAN BAPPENAS

Jakarta (13/6)—Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan rapat pembahasan grand design kearsipan dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Ruang Serbaguna Soemartini. Pada kesempatan ini Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Kearsipan (IPK), Imam Gunarto menyampaikan rancangan grand design yang telah disusun dan dibahas bersama di internal ANRI. Selanjutnya, Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Tatang Muttaqin mengulas Arah Kebijakan Bidang Kearsipan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Acara ini turut dihadiri pimpinan tinggi pratama, pejabat fungsional perencana dan peneliti di lingkungan ANRI.

Pada awal paparannya, Imam menyampaikan urgensi keberadaan ANRI dilanjutkan dengan arah RPJMN ANRI. Adapun ringkasan rancangan RPJMN ANRI pada 2020-2024 adalah transformasi arsip ke sistem digital. Di mana di dalamnya ada tiga hal besar yang menjadi fokus yaitu, penyusunan platform Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang mengakomodir arsip digital, optimalisasi bidang kearsipan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan pengelolaan arsip secara digital.



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan rapat pembahasan grand design kearsipan dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Ruang Serbaguna Soemartini. Pada kesempatan ini Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Kearsipan (IPK), Imam Gunarto menyampaikan rancangan grand design dan Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Tatang Muttaqin mengulas Arah Kebijakan Bidang Kearsipan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Tatang mengemukakan bahwa Arah Kebijakan Bidang Kearsipan untuk RPJMN 2020-2024 terdapat dua garis besar. Pertama, arsip sebagai bagian tata kelola pemerintahan dan kedua, arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa. Di samping itu, Tatang juga menekankan bahwa dalam merumuskan kedua hal tersebut perlu diperhatikan promosi dan pengemasan berbagai produk penyelenggaraan kearsipan agar lebih menarik bagi publik. Misalnya, penyampaian executive summary tentang kebijaksanaan kearsipan dikemas dalam bahasa yang lebih populer, sehingga mudah dipahami semua orang. Kemudian, bagaimana arsip

yang sudah digitalisasi, kemasannya bernilai jual dan lebih menarik sehingga publik memiliki minat tinggi dalam memanfaatkan arsip. Apalagi digitalisasi arsip juga dapat menjadi salah satu pendukung bagaimana layanan publik menjadi lebih cepat. Selanjutnya, dalam hal pengembangan sdm kearsipan diperlukan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dengan demikian, tidak hanya diminati atau menjadi daya tarik, kearsipan juga bahkan bisa menjadi kebutuhan atau bagian gaya hidup publik. (tk)

ANRI MENYERAHKAN CITRA KOTA PALEMBANG DALAM ARSIP

Palembang (17/6) - Kepala ANRI, Mustari Irawan menyerahkan Buku Citra Kota Palembang dalam Arsip sekaligus meresmikan pembukaan Pameran Arsip dengan tema "Kota Palembang dalam Lintasan Sejarah" dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke 1336 di Lapangan Benteng Kuto Besak, Kota Palembang.

Upacara peringatan yang dipimpin oleh Walikota Palembang, H. Harnojojo, dihadiri oleh Wakil Walikota Palembang, Ketua DPRD Kota Palembang, seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta seluruh pimpinan legislatif dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Kepala ANRI menyerahkan Buku Citra Kota Palembang yang berisi informasi Arsip mengenai eksistensi Kota Palembang sejak masa kerajaan sampai masa NKRI yang menggambarkan sejarah dan jati diri Kota Palembang.

Diharapkan dengan disusunnya Buku Citra Kota Palembang sebagai memori kolektif daerah, pemerintah serta masyarakat Kota Palembang dapat selalu mengingat jati diri akan kejayaan dan kemajuan Palembang tempo dulu serta meneladani tokoh-tokoh Palembang dalam upaya untuk kemajuan dan pembangunan Kota Palembang.

Kepala ANRI secara simbolis menyerahkan buku Citra Kota



Kepala ANRI, Mustari Irawan secara simbolis menyerahkan buku Citra Kota Palembang dalam Arsip kepada Walikota Palembang, H. Harnojojo

Palembang dalam Arsip kepada Walikota Palembang, Ketua DPRD Kota Palembang, dan Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kota Palembang.

Penyerahan buku tersebut diiringi dengan peresmian Pameran Kearsipan yang terselenggara atas kerjasama Direktorat Layanan &

Pemanfaatan Arsip ANRI dengan Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kota Palembang.

Peresmian Pameran dilakukan dengan seremoni pengguntingan pita secara bersama oleh Kepala ANRI, Walikota Palembang, dan Ketua DPRD Palembang. (AM & NR)

ANRI SELENGGARAKAN PAMERAN ARSIP DAN DISKUSI TENTANG SUKARNO DI ALJAZAIR



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Alger dan Kementerian Kebudayaan Republik Demokrasi Rakyat Aljazair menyelenggarakan kegiatan Pameran Arsip dan Diskusi tentang Sukarno di Palais de la Culture "Moufdi Zakaria", Aljazair.

Aljir, Juni 2019- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Alger dan Kementerian Kebudayaan Republik Demokrasi Rakyat Aljazair menyelenggarakan kegiatan Pameran Arsip dan Diskusi tentang Sukarno di Palais de la Culture "Moufdi Zakaria", Aljazair. Pameran dan diskusi ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Festival Sukarno yang dilaksanakan pada 15-23 Juni 2019.

Pameran Arsip Sukarno dibuka pada 15 Juni 2019 oleh Menteri Kebudayaan Republik Demokrasi Aljazair, Meriam Merdaci. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa Sukarno adalah tokoh yang sangat penting dalam mendukung kemerdekaan Aljazair terutama saat penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung. Hal senada juga disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Aljazair, Safira Machrusah yang menyampaikan bahwa Sukarno adalah tokoh besar bukan hanya sebagai Presiden

Indonesia tetapi juga pemimpin dunia khususnya bangsa Asia-Afrika. Sementara itu, Sekretaris Utama ANRI, Sumrahadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Festival Sukarno sejalan dengan usaha ANRI dalam mengangkat Sukarno Paper sebagai Memory of The World.

Pameran arsip ini menampilkan beberapa arsip baik arsip kertas, foto maupun video mulai dari masa kecil Sukarno hingga menjadi presiden. Terdapat pula arsip tentang kiprah politik di dunia internasional seperti KAA dan Gerakan Non Blok (GNB). Tentu saja yang paling utama adalah arsip tentang hubungan Indonesia-Aljazair khususnya dukungan-dukungan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Aljazair dalam usaha meraih kemerdekaan dari Perancis.

Pameran arsip Sukarno banyak dikunjungi oleh masyarakat Aljazair mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, generasi muda Aljazair dan para diplomat negara sahabat terutama dari negara-negara Asia-Afrika. Pameran ini juga secara khusus

diliput oleh Televisi Nasional Aljazair.

Selain pameran arsip, diselenggarakan diskusi tentang Sukarno pada 16 Juni 2019 dengan pembicara Drs. Agus Santoso, M.Hum (Direktur Layanan dan Pemanfaatan ANRI) dan Prof. Dr. Fadhila Alawi dari Universitas Bouzeria Alger. Secara garis besar kedua pembicara menyampaikan peranan dan pemikiran Sukarno dalam perdamaian dunia serta dalam usaha mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika.

Kegiatan delegasi ANRI dilanjutkan dengan pertemuan bersama Kepala Arsip Nasional Aljazair pada 17 Juni 2019. Pertemuan ini membahas perpanjangan kerjasama antara ANRI dengan Arsip Nasional Aljazair. Dalam kesempatan ini, Kepala Arsip Nasional Aljazair menyerahkan daftar dan scan arsip tentang Gerakan Non Blok I Tahun 1961 untuk mendukung pengajuan arsip GNB sebagai MoW. (WSP)




*Selamat Memasuki
Masa Purna Bhakti*

BAPAK DR. MUSTARI IRAWAN, MPA

**Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
(27 Desember 2013-30 Juni 2019)**

Semoga semua karya dan karsa Bapak menjadi ibadah dan mendapat ganjaran yang berlipat kali dari Allah SWT. Semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah SWT.



UNDUH MAJALAH **ARSIP** DALAM FORMAT DIGITAL



Cara unduh majalah ARSIP dalam format digital:

1. Masuk ke *website* www.anri.go.id
2. Klik menu "Publikasi"
3. Kemudian pilih "Majalah ARSIP"
4. Unduh *file* "Majalah ARSIP"
5. Majalah ARSIP tersedia dalam *Portable Document Format* (PDF) dan dapat dibaca menggunakan *software* Adobe Acrobat